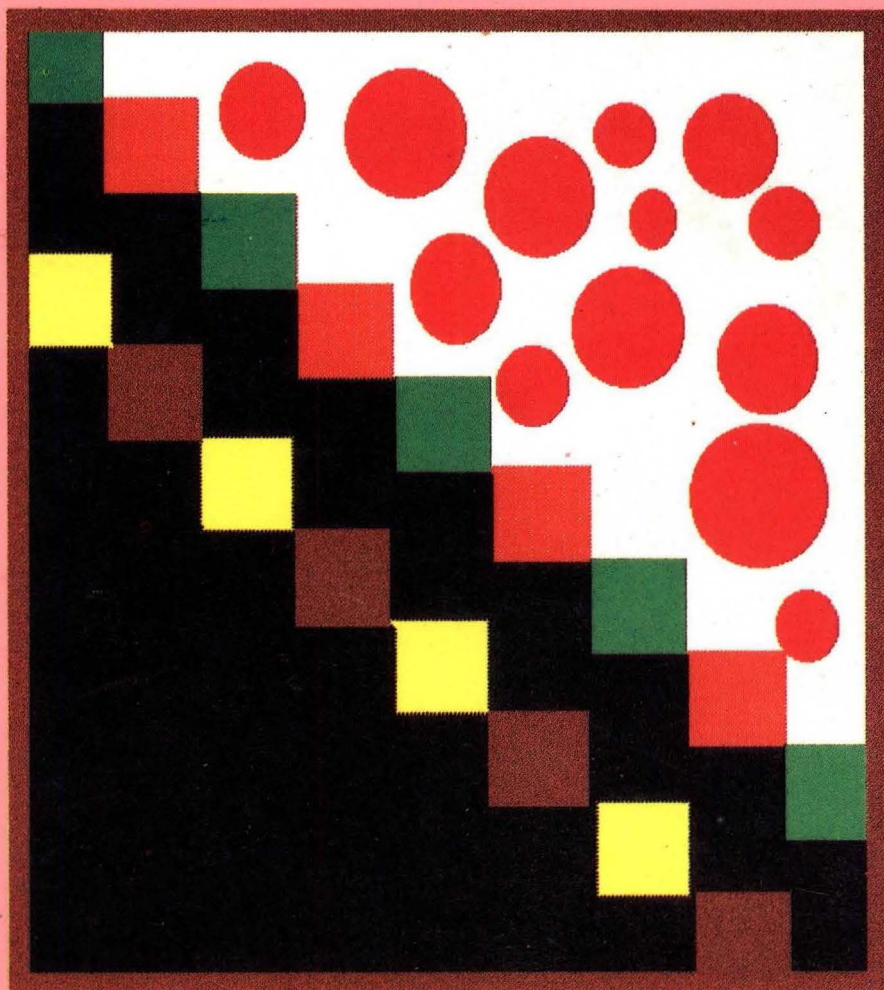


SIKAP BUDAYA ANTRI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1995/1996

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SIKAP BUDAYA ANTRI MASAYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
**BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI**
JAKARTA 1995/1996

Tim Peneliti/Penulis : Zulyani Hidayah,
Dra. Hartati
Dra. Herliswanny

Penyunting : Wisnu Subagijo

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan Pertama tahun 1996

Jakarta 1996

Di cetak oleh : **CV. BUPARA Nugraha - Jakarta**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

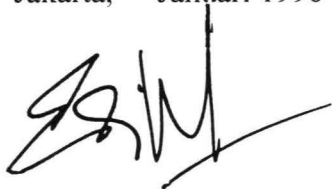
Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya merupakan usaha yang patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami gembira menyambut terbitnya buku yang merupakan hasil dari **Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini**, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling kenalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antara penulis dengan para pengurus Proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Januari 1996

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. DR. Edi Sedyawati

PRAKATA

Usaha pembangunan nasional yang makin ditingkatkan adalah suatu usaha yang berencana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan kehidupan warga masyarakat Indonesia. Usaha pembangunan semacam ini pada dasarnya bukanlah usaha yang mudah diterapkan. Berbagai persoalan dan kesulitan yang muncul dan dihadapi dalam penerapan pembangunan ini, antara lain berkaitan erat dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang antara lain ditandai oleh keanekaragaman suku bangsa dengan berbagai budayanya merupakan kekayaan nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya khas yang membedakan jati diri mereka dari suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dengan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu dan antarkelompok.

Berangkat dari kondisi, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berusaha menemukannya, mengkaji, dan menjelaskan berbagai gejala sosial, serta perkembangan kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan. Hal ini tidak bisa diabaikan sebab segala tindakan pembangunan tentu akan memunculkan berbagai tanggapan pada masyarakat sekitarnya. Upaya untuk memahami berbagai gejala sosial sebagai akibat adanya pembangunan perlu dilakukan, apalagi yang menyebabkan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencetakan buku "**Dampak Budaya Asing Terhadap Masyarakat Di Kawasan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta**" adalah salah satu usaha untuk tujuan tersebut diatas. Kegiatan ini sekaligus juga merupakan upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang berbagai kajian mengenai akibat perkembangan kebudayaan.

Penyusunan buku ini merupakan kajian awal yang masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan adanya berbagai masukan yang mendukung penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, Januari 1996

Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian
dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suhardi', with a stylized flourish at the end.

Suhardi -

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Bab I Pendahuluan	
A Latar belakang	1
B Masalah pokok	8
C Kerangka Pemikiran	10
1. Kebudayaan Umum Lokal Yogyakarta.....	10
2. Antri dan Disiplin	12
D Hipotesa Operasional	16
E Kontribusi/Kegunaan	17
F Metode	17
1. Populasi dan Sampel Sasaran	17
2. Teknik Pengumpulan	18
3. Sumber Informasi	18
4. Komponen Data	19
5. Jadwal	19
G Kerangka Penulisan	20

Bab II	Gambaran Umum Masyarakat Kota Yogyakarta	
A	Kondisi Kependudukan dan Fisik Kota Yogyakarta	23
B	Kebudayaan Umum Lokal dan Dominan	28
C	Masyarakat Pilihan	35
D	Nilai-nilai Budaya Kejawaan dan Perilaku Antri.....	39
Bab III	Perilaku Antri Masyarakat Yogyakarta	
A	Sikap Umum Terhadap Perilaku Antri.....	48
B	Pandangan Tokoh Masyarakat	57
C	Perilaku Antri di pusat Pelayanan Transportasi	62
D	Perilaku Antri di Pusat Pelayanan Umum	64
E	Perilaku Antri di Pusat Hiburan	66
Bab IV	Analisis	
A	Disiplin Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta	71
B	Sikap Dan Perilaku Antri Masyarakat Yogyakarta	76
Bab V	Kesimpulan	80
	Daftar Bahan Bacaan	83
	Pedoman Pengumpulan Data	85

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
II.1 Penduduk, Luas Wilayah Dan Kepadatan Per-Kecamatan Kotamadya Yogyakarta 1990	24
II.2 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Tahun Menurut Kecamatan Di Kotamadya Yogyakarta 1990	25
II.3 Banyaknya Kelahiran Dan Peduduk Pendetang Menurut Kecamatan Di Kotamadya Yogyakarta 1990	26
II.4 Banyaknya Kematian Dan Penduduk Yang Pergi Menurut Kecamatan Di Kotamadya Yogyakarta 1990	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan dan pengamatan lapangan yang dilaksanakan menurut proposal dengan judul sama seperti diberikan oleh Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Masa Kini (P2KMK) untuk tahun anggaran 1994-1995.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendukung kegiatan rutin Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, maka pada tahun anggaran 1994-1995 ini kegiatan Proyek Pengkajian Kebudayaan Masa Kini diarahkan kepada pendidikan dan pengkajian mengenai berbagai aspek sosial-budaya yang berkenaan secara langsung dengan berbagai dampak kegiatan pembangunan Nasional. Terutama oleh berbagai perubahan sosial-budaya yang terjadi karena peralihan kehidupan masyarakat, yaitu dari dominasi kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri.

Kegiatan pembangunan nasional Indonesia semakin meningkat dari setiap pelaksanaan tahap-tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun), antara lain berkat pengembangan secara positif dari usaha-usaha terencana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Dari pengalaman pelaksanaan Pelita Selama lima periode tersebut telah banyak disadari bahwa usaha-usaha pembangunan ini pada dasarnya bukanlah kegiatan yang mudah diterapkan begitu saja ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal amat majemuk.

Karena kemajemukan kehidupan sosial-budaya tersebut menyebabkan berbagai program pembangunan yang direncanakan secara terpusat dan serta seringkali tidak dapat diterima dan dimengerti oleh sebagian warga masyarakat. Di mana suatu program pembangunan yang diterapkan di suatu daerah belum tentu diterima oleh daerah lain.

Kata pembangunan sendiri dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak boleh diartikan semata-mata sebagai pembuatan sarana-sarana fisik atau pengembangan material, tetapi harus juga mencakup pembentukan mental, spiritual dan intelektual ke arah kepribadian manusia Indonesia yang sehat, sejahtera dan beradab. Dengan demikian pembangunan harus diartikan secara luas sebagai usaha-usaha pembentukan dasar-dasar yang kokoh bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dapat dikatakan pula, bahwa pembangunan material, mental dan spiritual tersebut merupakan sebagai strategi pokok untuk mencapai perwujudan cita-cita bangsa yang diinginkan bersama seperti terumus pada bagian Pembukaan UUD 1945. Secara operasional, batasan istilah pembangunan demikian dapat pula diartikan sebagai usaha-usaha mempercepat gerak perkembangan aspek-aspek kehidupan bangsa, sehingga memiliki kekuatan dan kelenturan untuk tumbuh sejajar dengan bangsa-bangsa maju umumnya.

Dalam GBHN 1983-1998 disebutkan, bahwa pada hakekatnya pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sejahtera lahir dan batin, sehat secara fisik dan mental serta memiliki daya intelektual yang tinggi. Dengan kata lain sasaran pembangunan nasional itu berpusat pada manusia itu sendiri, baik sebagai individu, sebagai bagian dari kelompok masyarakat, maupun sebagai kesatuan suatu bangsa. Sementara itu kesejahteraan lahir dan batin yang dimaksud tentulah terkait dengan perkembangan lingkungan, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional dan akhirnya global. Artinya kesejahteraan hidup yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia harus didasari oleh kesiapan fisik dan mental yang tangguh serta memiliki sikap berdisiplin menuju cita-cita nasional.

Pada periode sekarang kegiatan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Kedua boleh dikatakan telah dimulai. Sedangkan arahnya sendiri telah ditetapkan dalam GBHN 1993-1998, di dalam mana antara lain dinyatakan dengan jelas bahwa pembangunan nasional jangka panjang terencana itu diarahkan ke tahap "tinggal landas" menuju masyarakat maju dengan pola kebudayaan industri. Padahal kebudayaan industri itu sendiri juga menuntut berbagai pemantapan aturan-aturan, nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, dan sanksi-sanksi kehidupan industri moderen secara nasional. Dengan kata lain pengembangan kehidupan industri juga menuntut diberlakukannya perangkat pedoman bertindak yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan industri kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sesungguhnya modal dasar dan faktor-faktor dominan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut sudah dimiliki. Hal ini ditandai oleh adanya berbagai kemudahan dalam masalah pengalihan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang gerak pembangunan. Dimana sebagian dapat diperoleh dengan perhubungan dengan negara-negara lain.

Akan tetapi, kemudian prasangka dan sarana pembangunan fisik tersebut harus disertai pula dengan peningkatan kekuatan mental. Intelektual dan kepribadian yang luhur dan tetap kokoh di mana dan kapan saja ditempatkan. Dalam hal ini kita sorot masalah betapa perlunya pengembangan sikap dan perilaku berdisiplin tinggi. Pengembangan sikap dan perilaku disiplin tersebut terutama ditujukan untuk mencapai keserasian antara pembangunan fisik dan pembangunan mental, spiritual dan intelektual sebagai keseluruhan dari wujud kedisiplinan tersebut adalah perilaku antri dalam rangka melancarkan dan menertibkan gerak pembangunan di kalangan masyarakat umum.

Agar tercapai target pembangunan yang maksimal jelas sekali, betapa diperlukan berbagai usaha untuk mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat yang tertib seluruh lingkungan sosialnya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat lokal, sampai kepada lingkungan bangsa pada umum. Misalnya saja, telah sering diungkapkan oleh para ahli, bahwa keluarga (batih)

merupakan unsur paling pokok dari setiap masyarakat. Oleh karena itu keluarga adalah juga tempat penanaman nilai-nilai kedisiplinan demi tercapainya pembentukan fisik, mental spiritual manusia Indonesia yang tangguh. Kondisi lingkungan kemasyarakatan sehari-hari tidak boleh pula terabaikan, karena di tengah publik inilah penerapan disiplin diri bangsa Indonesia itu dilakukan, diuji dan dinilai ketangguhannya.

Telah sering pula diungkapkan orang, bahwa semakin besar fungsi dan peranan suatu lembaga sosial bagi kepentingan umum, semakin besar pula kedisiplinan yang dituntut, baik dari pihak pengelola dan penyelenggara lembaga tersebut, maupun dari warga masyarakat yang berkepentingan. Tuntutan akan perlunya kedisiplinan demi kelancaran dan ketertiban paling nampak jelas di lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau di tempat-tempat penyediaan sarana umum, tempat pelayanan masyarakat, maupun di pusat-pusat rekreasi umum. Betapa disiplin dalam perilaku antri amat diperlukan, misalnya saja di tempat-tempat penjualan karcis atau tiket di stasiun kereta api, tempat-tempat pelayanan kesehatan, pos dan telekomunikasi, perbankan. taman hiburan, bioskop dan lain-lain.

Budaya antri sendiri merupakan wujud dari sikap dan perilaku yang menghargai waktu dan menghargai hak-hak orang lain, karena itu terkait kepada sistem interaksi sosial dan kedisiplinan sosial. Orang-orang yang sudah merencanakan penggunaan waktunya secara ketat, membutuhkan pula ketepatan pelaksanaan rencana tersebut. Sehingga dalam kebudayaan industri orang yang tidak mengikuti budaya antri dengan baik akan menyebabkan kerugian waktu pada banyak orang lain.

Apabila hal tersebut di atas terjadi secara berkelanjutan, maka akan rusaklah tatanan kehidupan secara keseluruhan. Dalam kerangka berpikir ini kehidupan seakan-akan sudah dirancang sendiri oleh setiap orang untuk mengisi perjalanan hidupnya yang sudah di gariskan oleh nasib. Tidak heran jika keberhasilan seseorang hidup secara survive dalam kebudayaan industri sering dikatakan tergantung kepada kedisiplinan diri dan sosial yang dimilikinya.

Sehingga sikap dan perilaku antri sebagai perwujudan kedisiplinan diri dan sosial tidak dapat dibuat dalam waktu seketika, tetapi harus dibudayakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya.

Pilihan tema mengenai sikap budaya dalam perilaku antri ini sendiri amat relevan dengan berbagai usaha dalam rangka menyesuaikan gerak langkah pembangunan fisik dengan mentalitas bangsa Indonesia yang memiliki kedisiplinan hidup. Dari sudut lain perlu kita sadari bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa dan kebudayaan, serta masing-masing memiliki nilai-nilai budaya asli beragam pula coraknya.

Berdasarkan kenyataan sosial-budaya tersebut, maka perkembangan kedisiplinan hidup yang menjadi tuntutan kehidupan moderen dan mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk, maka perlu dikaji hal-hal yang berkenaan dengan pengaruh positif dan negatif dari corak nilai-nilai budaya lama dan asli di daerah-daerah terhadap perwujudan kedisiplinan tersebut. Dalam hal ini, fokus perhatian kita diarahkan kepada perilaku antri, yaitu salah satu perwujudan sikap dan perilaku berdisiplin yang paling sering kita temukan dalam kehidupan moderen. Selain itu antri merupakan sikap dan perilaku sosial yang menggunakan mentalitas individual sekaligus sosial.

Kata antri sendiri tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama oleh masyarakat perkotaan, karena gejala serta peristiwanya lebih sering terjadi di lingkungan kehidupan yang berpenduduk padat dan dengan ciri-ciri kehidupan sosial budaya yang kompleks. Mau atau tidak mau setiap orang yang hidup dikota harus mengalami bagaimana berada dalam suatu yang berkaitan dengan kepentingan bersama menyebabkan setiap orang dituntut untuk memiliki kedisiplinan dalam suatu antrian.

Sesungguhnya aspek ketertiban dan kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk dasar dari antri juga terdapat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Akan tetapi pengaturan kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh sumber daya dalam kehidupan komunitas paguyuban tersebut lebih dipengaruhi oleh

struktur sosial setempat. Sistem pembagian dan pemilikan sumber daya tertentu dalam kehidupan masyarakat tradisional biasanya dipengaruhi strata atau kelas-kelas sosial serta oleh sistem primordialisme yang mengutamakan hak-hak bagi golongan tertentu. Oleh karena itu perilaku antri pada masyarakat tradisional mungkin tidak dapat dipertemukan dengan sistem kehidupan di perkotaan yang lebih kompleks dan cenderung untuk mengabaikan kelas-kelas sosial. Misalnya, seorang kepala adat dan perangkat pemimpin adat disebuah desa tidak perlu antri menunggu giliran mendapat jatah hidangan makanan yang dibuat dari hewan yang dipotong untuk dikurbankan pada suatu upacara bersih desa, karena mereka sudah memiliki bagian tersendiri dan secara khusus diantar dihadapan mereka. Sedangkan golongan rakyat jelata harus antri di depan juru bagi untuk menunggu jatah masing-masing. Dalam sistem antri pada masyarakat moderen tidak demikian adanya, karena yang menjadi ketentuan adalah siapa yang lebih dulu datang dan lebih dulu siap itulah yang dilayani, tanpa membedakan status sosial yang bersangkutan.

Dalam kehidupan masyarakat industri moderen antri berkembang demikian moderat seperti perkembangan kehidupan manusianya yang liberal itu sendiri. Antri lalu menjadi kata kunci untuk menjamin ketertiban dan kelancaran umum dalam memperoleh sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kehidupan moderen yang ditandai oleh penghargaan orang terhadap waktu, adanya perencanaan kegiatan yang terjadual secara ketat, serta perlunya keteraturan guna menjamin kelancaran suatu kegiatan, merupakan kehidupan yang berorientasi kepada kebudayaan industri.

Perilaku antri pada masyarakat perkotaan di Indonesia seyogyanya kita tinjau lebih dulu dari kemasyarakatan yang paling mendasar di Indonesia. Sama seperti bangsa-bangsa yang sedang membangun lainnya, masalah yang paling mendasar yang dihadapi Indonesia adalah pengembangan kepribadian bangsa yang berdisiplin diri kuat dan mantap. Mentalitas seperti ini amat diperlukan, terutama dalam rangka menyatukan kerangka pedoman bertindak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk kepada satu sistem nilai budaya nasional. Kebutuhan akan acuan kepada

satu sistem nilai budaya yang sama tersebut semakin terasa mendesak ketika pembangunan nasional Indonesia telah diarahkan kepada tahap tinggal landas, artinya siap menjalankan pola kebudayaan industri secara mandiri.

Kota adalah tempat dimana kemajemukan masyarakat paling kentara, dan di mana tuntutan bagi kemandirian sikap mental di era tinggal landas lebih besar. Kota biasanya lebih dulu mengalami kontak-kontak dengan dunia luar, sehingga perubahan kebudayaan yang dirangsang oleh pengaruh global lebih terasa di kota dari pada di desa. Kota juga memiliki daya sentrifugal dengan daerah pedesaan yang menjadi penyangganya, sehingga perubahan-perubahan sosial ataupun sikap mental masyarakat kota ikut berpengaruh bagi masyarakat desa sekitarnya.

Sementara itu corak kemajemukan masyarakat kota di Indonesia sering pula dipengaruhi oleh adanya kebudayaan setempat yang lebih dominan, yaitu kebudayaan yang biasanya memiliki jumlah pendukung mayoritas dan merupakan penduduk yang pertama kali meramaikan pemukiman di kota itu. Kelompok masyarakat asli yang mayoritas tersebut dapat menjadikan sistem nilai budaya mereka sebagai perangkat pedoman bagi perilaku warga kota sehari-hari, paling tidak sebagai sistem nilai yang sering diutamakan dalam membuat berbagai pertimbangan sosial. Sehingga berbagai aspek kehidupan sosial di dalam masyarakat kota itu juga cenderung untuk mengacu kepada sistem nilai budaya yang dominan tersebut.

Sikap dan perilaku antri sesuatu perwujudan kedisiplinan masyarakat berkebudayaan industri memang pertama terlihat dalam kehidupan penduduk kota. Akan tetapi dalam perkembangannya tetap terpengaruh oleh sistem nilai budaya dari golongan masyarakat yang mayoritas dan sekaligus dominan. Misalnya, bagaimana seseorang yang merasa dirinya sebagai pejabat penting dari golongan ningrat setempat tidak mau ikut dalam antrian karcis kereta api, tetapi secara langsung datang kepala setasiun untuk minta diprioritaskan mendapat tempat yang lebih baik dan lebih dulu.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dipahami betapa perlunya dilakukan suatu pengkajian untuk memahami sikap dan perilaku masyarakat Indonesia pada waktu kini. Pilihan terhadap masyarakat kota Yogyakarta adalah untuk menunjukkan betapa corak kebudayaan kota yang terkadang diwarnai oleh adanya kebudayaan daerah yang dominan juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kedisiplinan warganya. Yogyakarta sendiri memang adalah salah satu contoh kota bermasyarakat heterogen serta ditandai oleh adanya suatu kebudayaan daerah yang dominan, yaitu kebudayaan Jawa.

B. MASALAH POKOK

Masyarakat Indonesia yang majemuk pada dasarnya adalah masyarakat berkebudayaan agraris dengan segala pola yang membatasi dan sekaligus menjadi cirinya. Namun perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin padat penduduknya serta semakin maju kehidupannya semakin menuntut adanya pola kebudayaan yang lebih mampu mensejahterakan kehidupan berjuta-juta rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman negara-negara maju maka pilihan kearah kebudayaan industri adalah jawaban bagi jalan keluar dalam rangka menyelenggarakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia seterusnya.

Kebudayaan industri menuntut adanya presisi, ketepatan, ketertiban dan keteraturan di segala bidang. Selain itu kebudayaan industri yang cita-citanya juga memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki pandangan dan perencanaan ke masa depan serta kesamaan sikap terhadap kelancaran dan hasil produktivitas yang tinggi. Dalam kebudayaan ini daya kreativitas dan produktivitas yang berkualitas dari individu lebih dihargai dari pada ketaatan kepada pola kerja yang menoton. Kemampuan seseorang untuk berinovasi menyempurnakan setiap temuan menjadi kunci keberhasilan dunia industri. Sehingga individu-individu yang, malas, tidak kreatif, tidak produktif dan tidak memiliki disiplin diri akan dianggap sebagai asset yang tidak berguna dan membebani dunia usaha saja.

Sementara itu, dalam masa peralihan ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh kebudayaan agraristradisional setempat yang masing-masing memiliki corak khas sendiri-sendiri. Ada daerah di mana kebudayaan umum lokalnya heterogen, dimana tidak ada setempat yang lebih kuat dan mendominasi kebudayaan lain. Sebaliknya banyak pula daerah di mana kebudayaan umum lokalnya didominasi oleh satu kebudayaan setempat. Kebudayaan-kebudayaan dominan yang berangkat dari kebudayaan asli setempat tersebut diantaranya ada yang mengandung ajaran mentalitas yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan industri.

Yogyakarta adalah salah satu kota besar di pulau Jawa yang memiliki ciri adanya dominasi kebudayaan Jawa "keraton" terhadap kebudayaan umum lokalnya. Tentu saja dominasi tersebut tidak berarti menguasai semua aspek kehidupan warganya. Akan tetapi karena menjadi acuan mayoritas penduduknya, maka kebudayaan Jawa tersebut juga lebih banyak mewarnai sikap dan perilaku warganya. Para pendatang dari berbagai suku bangsa bagaimanapun terpaksa menyesuaikan sikap dan perilaku tertentu dengan sistem nilai budaya orang Jawa di Yogyakarta umumnya.

Perkembangan Yogyakarta sendiri menjadi sebuah kota metropolitan ditandai oleh laju perkembangan ekonominya yang pesat, di samping tingginya angka mobilisasi penduduk, baik yang datang dan yang pergi dari sana. Betapapun perkembangan ekonomi dan mobilisasi penduduk tersebut, namun kota Yogyakarta tetap didiami oleh mayoritas penduduk berkebudayaan Jawa.

Kenyataan-kenyataan sosial budaya demikianlah yang nampak dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta. masyarakat di kota ini sebenarnya cukup heterogen, seperti terlihat dari asal usul daerah dan latar belakang kebudayaan "bawaan" penduduknya yang beragam. Sebagai sebuah kota besar, Yogyakarta juga sedang beralih dari kota yang hidup dari dinamika kebudayaan petani tradisional di sekitarnya, menjadi kota industri dan perdagangan yang memperhitungkan efisiensi dan efektivitas sistem ekonomi berdasarkan nilai materi alias profit.

Proses perubahan mentalitas masyarakat Yogyakarta mungkin tidak sedemikian drastis, karena sistem nilai kebudayaan kraton "Ngayogyakarta Hadiningrat" masih tetap dianggap sebagai acuan atau pedoman bertindak oleh sebagian besar penduduknya. Sehingga berbagai sikap mental yang sering tumbuh bersamaan dengan perkembangan kebudayaan industri, di Yogyakarta malah mengalami penyesuaian dengan sistem nilai budaya setempat. Misalnya, perilaku antri dari kebanyakan warga masyarakat masih diwarnai oleh corak struktur sosialnya nilai-nilai lama, seperti tersymbol dalam ungkapan-ungkapan tradisionalnya : *rame ing gawe, sepi ing pamrih, tepo seliro, alon-alon waton kelakon, mangan ora mangan asal ngumpul, wong besar di depan, wong cilik nunut*, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan sosial budaya masyarakat Yogyakarta tersebut maka masalah yang perlu kita kaji berbunyi sebagai berikut: "Bagaimana pengaruh sistem nilai budaya setempat yang dominan terhadap sikap dan perilaku antri yang dikembangkan masyarakat Yogyakarta dalam rangka penyesuaian diri dengan perubahan ke arah kebudayaan industri?"

Masalah pokok demikian memang menggariskan seolah-olah perilaku antri adalah sikap mental baru yang mungkin tidak dikenal dalam kebudayaan lama. Dan bahwa sikap dan perilaku antri itu sendiri berdiri di antara dua sistem nilai budaya yang cenderung bertolak belakang. Bagaimanapun masalah ini merupakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab di akhir tulisan.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kebudayaan Umum Lokal Yogyakarta

Bagi banyak orang, kota merupakan pusat orientasi kegiatan, bahwa acuan bagi nilai budayanya sekalipun, karena disana terdapat berbagai sarana dan tempat tinggal orang-orang yang dianggap sebagai pembuat kebijakan atau keputusan. Kota sering kali identik dengan segala macam pembaruan, inovasi, modernisasi, dan urbanisasi, karena itu kota juga merupakan tempat perwujudan

kehidupan industri beserta dengan unsur-unsurnya, seperti pabrik, pasar, transportasi, akomodasi, perkantoran, bahkan juga tempat-tempat rekreasi dan hiburan.

Secara keseluruhan kota menunjukkan adanya suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki perilaku dinamis, setidak-tidaknya lebih dinamis dari pada perilaku penduduk pedesaan. Akan tetapi kompleksitas kegiatan, kemajemukan masyarakat, serta dinamika perilaku masyarakat yang demikian tinggi tidak selalu menjadikan kebudayaan satu kota sama dengan kota-kota yang lain. Kehidupan masyarakat kota di Indonesia sebagian besar dicirikan oleh adanya suatu kebudayaan asli setempat yang dominan, sehingga sistem nilai yang berkembang di sana juga terpengaruh oleh kekuatan sistem nilai kebudayaan dominan tersebut.

Gejala kehidupan kota besar di Indonesia demikian pertama kali dikemukakan oleh Brunner (1962) setelah melakukan serangkaian penelitian di kota-kota besar di Sumatera dan Jawa. Brunner menemukan betapa kota-kota besar seperti Medan dihuni oleh penduduk yang plural dan berorientasi kepada kehidupan urban sejati yang ditandai oleh tidak adanya suatu kebudayaan suku bangsa yang Dominan. Sebaliknya banyak sekali kota-kota besar yang berpenduduk plural, akan tetapi tetap didominasi oleh kebudayaan suku bangsa asli setempat yang biasanya juga mayoritas dalam jumlah. Misalnya masyarakat kota Bandung yang ditandai oleh dominasi kebudayaan Sunda, kota Semarang yang di dominasi oleh kebudayaan Jawa, atau kota Yogyakarta yang didominasi oleh kebudayaan Jawa Keraton "Ngayogyakarta Hadiningrat".

Masyarakat kota Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian ini sudah tergolong kepada masyarakat urban yang heterogen. Keanekaragaman penduduknya tidak hanya ditandai oleh adanya berbagai latar belakang suku bangsa, tetapi juga oleh adanya kelompok-kelompok sosial, berdasarkan perbedaan kedudukan, kemampuan ekonomi, dan pendidikan. Sebagai negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan yang otokratis, akan tetapi kesultanan Yogyakarta merupakan suatu pengecualian. Jasa-jasa para pemimpin dan rakyatnya pada zaman pergerakan

kemerdekaan dan zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan menyebabkan mereka dianggap patut mendapat "keistimewaan". Propinsi Yogyakarta tidak lain wilayah kesultanan itu sendiri, dan adat istiadat keraton tetap dijadikan acuan resmi kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan daerah sekaligus menjadi pusat orientasi kebudayaan masyarakat Jawa yang menganggap diri sebagai "kawula ing Ngayogyakarta Hadiningrat" rakyat Yogyakarta. Oleh karena itu lingkungan sosial budaya kota Yogyakarta masih memiliki kebudayaan daerah yang dominan, yaitu kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan "keraton" atau "negeri gung"

2. Antri dan Disiplin

Kata antri mengingatkan kita ke tempat-tempat tertentu di mana sekumpulan orang harus mematuhi urutan mendapat giliran memperoleh kesempatan atau barang tertentu. Unsur utama dari peristiwa antri ini adalah adanya unsur kedisiplinan yang dijalankan oleh sejumlah orang yang memiliki kebutuhan yang sama akan sumber daya tertentu yang terbatas jumlahnya. Sebagai suatu sikap mental antri memang terkait erat kepada disiplin diri pribadi, dan disiplin kemasyarakat di mana individu berada. Karena itu dalam mengkaji antri perlu dijelaskan lebih dulu bagaimana gejala disiplin dalam diri individu dan masyarakat.

Menurut Suratman (1988: 2-3) disiplin selalu ada kaitanya dengan tiga unsur kepribadian manusia, yaitu jiwa, watak dan perilaku. Berkenaan dengan jiwa maka disiplin itu ditentukan oleh tingkat daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam tingkat ini dikatakan bahwa disiplin mengandung aspek kemampuan manusia memenuhi sesuatu melalui pengendalian ketiga unsur kejiwaan tersebut. Sehingga disiplin diartikan oleh Suratman sebagai suatu perbuatan kepatuhan yang dilakukan dengan sadar untuk melaksanakan suatu sistem dengan sikap menghormati, dan taat menjalankan keputusan, perintah atau aturan yang berlaku (q.e. Murniatmo, 1994: 49).

Menurut Bintarto (1983: 103) disiplin dalam diri seseorang tergantung kepada sifat dirinya, situasi-kondisi, serta kebutuhan atau keinginan tertentu. Dengan kata lain kedisiplinan diri seseorang

dapat berubah-ubah menurut situasi dan kondisi yang berbeda. Namun sama seperti perilaku sosial lain, menurut Warnaen disiplin termasuk salah satu produk sosialisasi, bahwa kedisiplinan seorang anak manusia dia pelajari sejak dari lingkungan keluarga batihnya, dari orang yang lebih tua, dari masyarakat dan dari orang yang lebih berkuasa (Warnaen, 1985: 21)

Disiplin sosial sendiri merupakan wujud dari kesatuan sikap individu dalam menjalankan disiplin. Namun untuk mengkaji disiplin sosial, maka menurut Raharjo (1987: 54-57) diperlukan suatu konteks sosial yang menjadi arena wilayah kerja disiplin sosial tersebut. Dalam hal ini disiplin sosial merupakan sarana pengontrol perilaku anggota masyarakat agar kehidupan di lingkungan tersebut dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu disiplin, dan apapun bentuk perwujudannya, tidak dapat lepas dari karakteristik sosial lingkungan etnisnya.

Antri dapat diartikan sebagai perilaku sosial sekumpulan orang yang mematuhi aturan mendapat pelayanan memperoleh kebutuhan umum yang terbatas secara bergilir menurut urutan kedatangan, siapa yang lebih dulu datang dialah dulu dilayani. Pengertian ini mengkaitkan sejumlah komponen situasi sosial, pertama adalah adanya sekumpulan orang yang memiliki minat dan kebutuhan yang sama dan sama-sama ingin dan berkepentingan untuk memenuhinya. Kedua adalah adanya tuntutan waktu, dan keterbatasan sumber daya berupa kebutuhan dan pendistribusiannya, sehingga memaksa setiap orang mengikuti aturan pelayan secara bergiliran.

Ketiga, adalah adanya ketentuan yang disepakati dan dibudidayakan secara umum bahwa yang datang lebih dulu, akan lebih dulu pula dilayani. Sebagai suatu kesepakatan umum maka sanksi-sanksi terhadap pelanggaran ini juga lebih bersifat umum. Artinya jika pelanggaran tersebut sampai ketinggian terganggunya keteraturan dan ketentraman umum maka dapat dituntut menurut undang-undang yang berlaku. Sementara itu terganggu atau tidaknya keteraturan umum tersebut amatlah relatif dan publik sifatnya.

Keempat, sikap dan perilaku antri amat diperlukan di lingkungan badan-badan pendistribusian atau lembaga-lembaga pelayanan kebutuhan dan kepentingan umum. Dimana orang dari berbagai tingkat gender dan status sosial karena minat dan kepentingan memenuhi kebutuhan yang sama, memerlukan perilaku pelayanan yang sama pula.

Dari sudut lain antri adalah salah satu perwujudan kedisiplinan sosial seperti disinggung oleh Raharjo di atas. Besarnya peranan aspek sosial dalam perilaku antri dapat dilihat dari keterkaitannya dengan unsur-unsur sosial dasar, yaitu adanya sejumlah orang (*social alignment*), ketentuan-ketentuan sosial (*social standard*), pengkategorian sosial (*social category*) dan sanksi-sanksi sosial (*Social sanctions*).

Keempat unsur ini saling mempengaruhi dan menentukan satu sama lain. Berkenan dengan peristiwa antri selalu ada sejumlah orang yang secara bersamaan berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tidak mungkin diperoleh secara bebas. Sulitnya memperoleh kebutuhan secara bebas mungkin disebabkan oleh karena kelangkaan atau keterbatasan jumlahnya. Demi ketertiban dan kelancaran penyaluran pemuasan kebutuhan tersebut maka diadakanlah ketentuan-ketentuan sosial. Akan tetapi kondisi sosial itu sendiri menyebabkan pelaksanaan antri juga dipengaruhi oleh pengkategorisasian sosial menurut kebudayaan para pendukungnya. Selanjutnya perilaku sosial dalam antri juga memiliki sanksi-sanksi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh ketiga unsur sosial yang lain.

Di dalam kehidupan masyarakat yang mengacu kepada kebudayaan industri maju antri adalah salah satu unsur utama yang mengandung sikap menghargai waktu, menghormati hak-hak orang lain, dan mematuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan sosial demi menjaga kelancaran dan ketertiban sistem kehidupan bersama itu sendiri.

Sayangnya belum ada tulisan-tulisan hasil penelitian serius yang khusus menguraikan masalah sikap dan perilaku budaya antri dan hubungannya dengan peralihan kehidupan masyarakat dari kebudayaan agraria tradisional kepada kebudayaan industri moderen.

Tulisan-tulisan ringan di berbagai media masa juga amat jarang menyentuh persoalan mendasar dari aspek yang satu ini. Dengan demikian, ini adalah suatu tantangan tersendiri bagi tim peneliti dan penulis untuk merumuskan sendiri konsep dan batasan-batasan konsep yang mengkaitkan perilaku antri dengan perubahan sosial.

Karena kata antri adalah istilah yang amat biasa dalam kehidupan masyarakat moderen, akibatnya banyak orang merasa tidak perlu lagi mendefinisikan atau mencari pengertian yang lebih mendalam tentang itu. Alasan-alasan yang melatarbelakangi penelitian mengenai antri ini menunjukkan betapa masyarakat Indonesia yang sedang beralih dari kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri masih perlu membenahi perilaku sosial yang satu ini.

Jadi antri dapat diartikan sebagai perilaku sosial sekumpulan orang yang mematuhi aturan untuk mendapat pelayanan memperoleh kebutuhan umum secara bergilir menurut urutan kedatangan, siapa yang lebih dulu datang dialah yang lebih dulu dilayani. Pengertian ini mengkaitkan sejumlah komponen situasi sosial, pertama adalah adanya sejumlah orang yang memiliki minat dan kebutuhan yang sama dan yang sama-sama ingin dan berkepentingan untuk memenuhinya (*social alignment*). Kedua adalah adanya tuntutan waktu, keterbatasan sumberdaya berupa kebutuhan dan distribusinya, sehingga memaksa setiap orang mengikuti aturan pelayanan secara bergiliran (*social standart*).

Ketiga, ada ketentuan yang disepakati dan dibudayakan secara umum bahwa yang datang lebih dulu, lebih dulu pula dilayani (*social category*). Sebagai suatu kesepakatan umum maka sanksi-sanksi terhadap pelanggaran ini juga lebih bersifat umum (*social sanction*). Artinya jika pelanggaran tersebut sampai ke tingkat terganggunya keteraturan umum dapat dituntut menurut hukum yang berlaku. Terganggu atau tidaknya keteraturan umum tersebut amatlah relatif dan publik sifatnya.

Keempat, bahwa perilaku antri amat diperlukan dilingkngan lembaga-lembaga pendistribusi atau badan-badan pelayanan kebutuhan dan kepentingan umum. Di mana orang-orang dari

berbagai tingkat gender dan status sosial karena minat dan kepentingan memenuhi kebutuhan yang sama memerlukan perilaku pelayan yang sama pula.

D. HIPOTESA OPERASIONAL

Untuk kepentingan pelaksanaan penelitian, baik studi perpustakaan maupun pengamatan lapangan dan penulisannya sendiri, maka perlu kiranya dirumuskan suatu hipotesa kerja. Berangkat dari berbagai pengertian tentang antri seperti terurai dibagian atas dapatlah dibuat suatu asumsi yang umum sifatnya. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa semakin besar kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan memenuhi dorongan minat, keinginan dan kepentingan bersama terhadap suatu kebutuhan yang langka atau terbatas jumlahnya, maka akan semakin besar pula tuntutan kepada keteraturan mengikuti giliran.

Namun dalam kenyataan, perilaku antri yang berkembang dalam berbagai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ditentukan pula sejumlah faktor lain, terutama oleh kemajuan kebudayaan yang berkembang. Kebudayaan kota, misalnya, tidaklah sama antara satu kota dengan kota lain, mengingat masih adanya pengaruh dari kekuatan dominasi kebudayaan asli setempat. Selain itu secara keseluruhan faktor dominasi kebudayaan agraris yang masih terasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Sikap dan mentalitas kebudayaan lama bagaimanapun masih tertanam di dalam pola bagi tindakan atau pedoman pola kebudayaan masyarakat sedang beralih dari kebudayaan agraris kepada masyarakat berkebudayaan industri.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka hipotesa kerja tersebut perlu kita perbaiki sebagai berikut. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dan kelancaran dalam memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang langka atau jumlahnya terbatas ditentukan oleh sistem nilai budaya yang dijadikan pedoman dalam bertindak.

E. KONTRIBUSI/KEGUNAAN

Hasil dari kegiatan penelitian dan pengkajian mengenai aspek perilaku antri di kalangan masyarakat kota Yogyakarta ini terutama ditujukan sebagai bahan masukan bagi pembuatan kebijaksanaan di bidang kebudayaan nasional. Diharapkan hasil penelitian dan pengkajian ini dapat menyumbangkan gagasan berupa pengertian dan saran yang berguna dalam membina dan mengembangkan sistem nilai budaya nasional, sehingga dapat melahirkan manusia Indonesia yang bermental kuat dan memiliki kepribadian yang kreatif dan berdisiplin tinggi di kalangan masyarakat umum. Di sudut kegiatan ini diharapkan mengisi ruang kosong keterbatasan database di bidang sikap dan perilaku antri.

F. METODE

1. Populasi dan Sampel Sasaran

Sesuai dengan kebijaksanaan pihak penyelenggara proyek maka populasi sosial yang menjadi sasaran penelitian ini adalah masyarakat kota Yogyakarta. Penentuan pilihan populasi ini nampaknya didasarkan kepada alasan, bahwa Yogyakarta adalah salah satu daerah berkebudayaan umum lokal yang didominasi oleh satu kebudayaan lama dan asli setempat, yaitu kebudayaan Jawa "Keraton". Dengan demikian hasil penelitian terhadap populasi sasaran yang satu ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi hasil penelitian pada masyarakat daerah lain yang lebih bersifat heterogen dan tidak memiliki kebudayaan setempat yang dominan di atas yang lain.

Mengingat populasi sasaran adalah masyarakat umum penghuni kota Yogyakarta, maka sampling tidak dikembangkan kepada kelompok-kelompok khusus. Sampel populasi akan lebih cenderung bersifat purposive, artinya akan menjadikan kelompok sosial yang paling berkepentingan dengan antri sebagai sasaran. Terutama di pusat-pusat pelayanan kebutuhan umum yang memiliki daya tampung terbatas dan pemanfaatan waktu terbatas. Misalnya kerumunan masyarakat yang antri distasiun kendaraan penumpang umum (kereta api, bus, oplet, bemo, bandar udara, dan bandar laut).

di kantor pelayanan kebutuhan umum (rumah sakit pos dan telekomunikasi, perpustakaan listrik, kantor kelurahan, perbankan), dan ditempat-tempat hiburan umum seperti di bioskop, taman hiburan, teater dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Fakta-fakta sekitar sikap perilaku antri ini terutama terungkap lewat pengamatan terlibat langsung. Penelitian ikut antri dan merekam berbagai perilaku kerumunan berbagai orang yang terlibat. Bersamaan dengan itu peneliti berusaha memancing opini individu-individu yang ikut antri mengenai arti, manfaat dan tujuan antri itu sendiri. Jika mungkin penelitian dapat melakukan wawancara berpedoman kepada beberapa orang warga masyarakat pengguna jasa yang bersangkutan yang dinilai cukup terpelajar dan dapat memberikan jawaban dengan benar.

Data lain dapat diperoleh lewat wawancara oleh proyek serta terhadap sejumlah petugas yang melaksanakan secara langsung pelayanan, dan terhadap penanggungjawab tempat-tempat pelayanan umum tersebut. Golongan terakhir ini misalnya adalah kepala kantor, kepala bagian atau kepala humas yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi masalah antri di lingkungan kebudayaan setempat.

3. Sumber Informasi

Menyadari keterbatasan yang disediakan oleh proyek serta keterbatasan pada kemampuan peneliti sendiri, maka dalam kesempatan ini hanya dapat dilakukan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan. Karena itu selain data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan terlibat, juga akan dimanfaatkan pendapat-pendapat para tokoh masyarakat kota Yogyakarta sebagai informan pokok. Misalnya budayawan, ahli budaya dari lingkungan perguruan Tinggi dan pejabat pemerintah yang berwenang.

4. Komponen Data

Ruang lingkup penelitian paling tidak mencakup empat variabel penentu komponen data, yaitu:

1. masyarakat umum pengguna jasa,
2. petugas/pejabat penjelenggara jasa umum,
3. tokoh-tokoh budayawan dan ahli sosial-budaya sebagai sumber opini,
4. aturan-aturan rormal mengenai antri itu sendiri.

Dari setiap komponen sasaran pengamatan dan wawancara ditentukan ciri-ciri kondisi individualnya sebagai berikut: Usia, jenis kelamin, latar belakang sosial-budaya, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pandangan masa depan.

5. Jadwal

Penelitian dan pengkajian sikap dan perilaku budaya antri di lingkungan masyarakat kota Yogyakarta ini diperkirakan akan memakan waktu sampai dengan 6 bulan, yaitu sampai dengan dihasilkannya sebuah laporan hasil penelitian yang sesuai dengan ketentuan kerangka acuan ini. Penjadualan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Persiapan, 1 bualan.

Studi literatur, pembuatan pedoman wawancara, pengadaan tape recorder dan kamera.

- b. Penelitian lapangan , 1 bulan.

Pengurusan izin penelitian di kantor-kantor pemda setempat penentuan lokasi-lokasi sasaran pengamatan. pemilihan informan pokok dan infrorman pendamping, pelaksanaan Pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder jika mungkin

- c. Pengolahan data dan informasi, 1 bulan
- d. Penulisan laporan awal, 2 bulan
- e. Penulisan laporan akhir (naskah usulan pracetak). 1 bulan.

G. KERANGKA PENULISAN

Hasil penelitian perpustakaan dan pengamatan lapangan mengenai masalah antri di kota Yogyakarta ini dituangkan ke dalam sejumlah pembabakan tulisan. Bab I adalah pendahuluan yang diangkat dari proposal dan hasil penelitian ini sendiri. Di dalamnya akan diuraikan segala hal mengenai identitas kegiatan penelitian sejak dari awal, yaitu meliputi latar belakang, masalah pokok, kerangka penelitian, hipotesa operasional, kontribusi dan metode serta prosedur teknis yang dimaksud latar belakang masalah, yaitu pemikiran pokok yang menjadi titik tolak orientasi dari pengadaan kegiatan penelitian ini. Kemudian pokok masalah yang di bahas, yaitu pembatasan masalah yang digariskan secara tegas agar ruang lingkup penelitian tidak keluar dari kerangka, sekaligus menguatkan pernyataan tentang "apa" yang akan ditemukan dari kegiatan pengkajian ini. Selanjutnya kerangka pemikiran, yaitu konsep-konsep dan cara memandang masalah serta sebagai usaha untuk menjelaskan secara konseptual variabel-variabel apa saja yang terkait dengan masalah perilaku antri dalam suatu masyarakat heterogen seperti di Yogyakarta, serta tulisan-tulisan yang sudah mengenai masalah pokok ini ada yang dapat disumbangkan dan tujuan apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini. Lantas mengenai hipotesa-hipotesa operasional yang reliabel dan relevan diungkapkan guna mempertajam wawasan dalam kegiatan penelitian dan penulisan. Akhirnya adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai serta prosedur teknis yang dijalankan.

Bab II gambaran umum masyarakat kota Yogyakarta, yang mengetengahkan tentang lingkungan sosial masyarakat kota Yogyakarta dan berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah perilaku antri di tempat-tempat umum. Untuk itu melalui sub-sub bab yang ada diuraikan tentang bagaimana gambaran umum kondisi fisik dan kehidupan masyarakat umum lokal dan kebudayaan dominannya. Kemudian penjelasan tentang ciri-ciri kebudayaan kota setempat yang menjadi ruang lingkup studi perilaku antri, terutama berkenaan dengan ciri-ciri masyarakat Yogyakarta sebagai masyarakat yang sedang beralihan dari orientasi kepada pola kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri. Selanjutnya uraian

mengenai kaitan antara nilai-nilai budaya yang ada dengan perilaku antri. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran warga masyarakat akan nilai-nilai budaya yang menjadi perangkat pedoman bertindak dengan makin berkembangnya tuntutan gaya hidup serta mentalitas masyarakat industri maju.

Selanjutnya dalam BAB III, Perilaku Antri masyarakat kota Yogyakarta pada bab ini akan diuraikan bagaimana perwujudan perilaku antri masyarakat kota Yogyakarta di berbagai pusat pelayanan transportasi, seperti di stasiun kereta api, terminal bus, bandar udara, dan tempat-tempat mangkal kendaraan umum dalam kota. Disini akan tergambar bagaimana disiplin masyarakat dengan aturan-aturan bagi kelancaran dan ketertiban, bagaiman sistem ketertiban yang dikembangkan, termasuk sanksi dan pengamanannya. Kemudian adalah mengenai perilaku antri yang terjadi di pusat-pusat pelayanan umum, seperti di kantor pos, kantor PLN, telepon, bank, kecamatan dan lain-lain. Terakhir adalah mengenai kondisi perilaku antri warga masyarakat di pusat-pusat hiburan, seperti di bioskop, di taman hiburan, di pertunjukan musik panggung terbuka dan sebagainya.

Bab III inilah yang secara khusus membahas bagaimana proses perkembangan perilaku antri dikalangan masyarakat Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan bagaimana sikap masyarakat Yogyakarta pada umumnya mengenai antri. Untuk memperkuat kejelasan pandangan masyarakat umum tersebut maka akan dijelaskan bagaiman pula pandangan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan masalah ketertiban dan kelancaran sosial, seperti para kepala instansi, budayawan, pendidikan, intelektual dan sebagainya.

Berkenaan dengan kesiapan badan, atau lembaga pendistribusian kebutuhan umum yang menyelenggarakannya melalui sistem antri akan di mintai pula pandangan dan pendapat dari para petugas pelaksana dan pembuat keputusan. Penyajian hasil penelitian itu akan bersifat deskriptif dengan memploting pengamatan, artinya satu demi satu akan memperlihatkan bagaimana perilaku masyarakat pada saat antri di tempat-tempat tertentu.

Semua bahan pemikiran yang diperoleh dari data dan informasi hasil penelitian lapangan dan bahan-bahan literatur sebagai pembanding tersebut di atas akan dianalisis dalam Bab. IV. Diharapkan pada bab ini akan diperoleh suatu tesis baru yang dapat menjadi pembuka wawasan kita mengenai masalah disiplin sosial masyarakat kota, khususnya dalam masalah ketertiban dan kelancaran yang terkandung dalam sistem antri.

Bagaimana hasil akhir yang terungkap dari tahap-tahapan penulisan pada bab-bab di atas dapat ditemukan pada Bab V, yaitu kesimpulan. Sifatnya mungkin lebih banyak merupakan pernyataan tentang masalah pokok dan pembuktian tentang kebenaran atau perbaikan terhadap hipotesa-hipotesa kerja yang diungkapkan di bagian depan.

Selain disertai dengan sejumlah bahan bacaan yang referensial dengan masalah, tulisan ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Ada beberapa catatan kasus yang kami anggap penting sekali dilampirkan agar pembaca dapat pula mengetahui apa dan bagaimana kira-kira keadaan keluarga poligini yang menjadi sampel obyek dalam penelitian lapangan.

Selanjutnya dengan sadar kami nyatakan bahwa tulisan ini belum merupakam suatu hasil penelitian yang maksimal. Keterbatasan waktu, dana dan kesiapan prosedural yang sederhana menjadikan tulisan ini juga tidak sekuat bobot tulisan para tulisan para profesional. Sungguhpun begitu kami tetap berharap agar tulisan ini bisa menyumbang, minimal dapat merangsang pemikiran ilmiah yang lebih serius mengenai masalah ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

A. KONDISI KEPENDUDUKAN DAN FISIK YOGYAKARTA

Kotamadya Yogyakarta mempunyai luas wilayah sekitar 32,50 km². Pemukiman di perkotaan ini tergolong sangat padat yaitu ditandai oleh menumpuknya bangunan perumahan tempat tinggal, pertokoan, rumah makan, hotel, perkantoran, rumah sakit, sekolah, pasar, tempat hiburan, dan tempat ibadah. Belum terhitung jaringan jalan raya jalan lingkungan, serta jalan kereta api jembatan dan stasiun atau terminalnya, yang setiap tahun terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Sehingga ada yang mengatakan, bahwa di Yogyakarta saat ini susah untuk mencari tempat-tempat yang masih terbuka. Bahkan di daerah pinggiran kota sekalipun lahan persawahan cukup subur banyak diubah menjadi tempat pemukiman. Padatnya ruang pemukiman menyebabkan tataletak bangunan tersebut menjadi tidak teratur. Bagian depan rumah sering menjadi tidak jelas, dan jarang sekali memiliki halaman yang cukup nyaman.

TABEL II.1
PENDUDUK, LUAS WILAYAH
DAN KEPADATAN PER-KECAMATAN
KOTAMADYA YOGYAKARTA
1990

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Kecamatan km ²	Kepadatan Penduduk Per km ²
	f	%		
Mantrijeron	32.842	8,0	2.58	12.713
Kraton	22.08	5,5	1,37	16.647
Mergabgsan	32.188	7,8	2,33	13.815
Umbulharjo	58.026	14,1	7,58	7.655
Kotagede	23.430	5,7	1,10	6.972
Gondokusumo	56.561	13,7	4.04	14.000
Danurejan	23.430	5,7	1,10	21.300
Pakualaman	12.181	3,0	0,64	19.000
Gondomanan	17.659	4,3	1.13	15.627
Ngapilan	20.494	5,0	0,86	23.056
Wirobrajan	26.975	6,5	1,80	14.986
Gedongtengen	22.825	5,5	0,99	23.056
Jetis	30.603	7,4	1,72	17.792
Tegalrejo	32.168	7,8	2,93	10.979
Kodya Yogyakarta	412.059	100,0	32,50	12.679

Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Yogyakarta 1990

Kepadatan penduduk Yogyakarta berpengaruh kepada berbagai sumberdaya alam pendukung kehidupan manusianya. Seperti masalah air bersih merupakan hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup suatu komunitas, apalagi di lingkungan kehidupan kota yang demikian kompleks. Dampak paling jelas dari kepadatan tersebut di atas adalah tingginya pencemaran air tanah, yang berakibat kepada menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah. Pengaruh lain adalah terhadap berbagai aspek kebutuhan hidup urban. seperti masalah sumber energi, khususnya tenaga aruslistrik untuk penerapan dan penggerak kegiatan industri, masalah

pembuangan dan pendauran sampah, masalah transportasi atau kegiatan ekonomi pasar, penghijauan alias pengembangan paru-paru kota dan sebagainya.

Kepadatan penduduk kota Yogyakarta bukan karena derasnya arus pendatang dari pedesaan sekitarnya, tetapi juga karena banyaknya pendatang dari daerah dan suku bangsa lain yang bermukim di Yogyakarta. Predikat yang disandang Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan wisata merupakan bukti betapa besarnya daya tariknya.

TABEL II. 2

RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTAHUN
MENURUT KECAMATAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
1980 - 1990

Kecamatan	Penduduk Hasil Sensus 1980	Penduduk Hasil Sensus 1990	Laju Pertumbuhan Penduduk
Mantrijeron	31.561	32.845	0,40 %
Kraton	26.557	22.807	-1,51 %
Mergangsan	32.683	32.188	-0,15 %
Umbulrejo	37.374	58.026	4,50 %
Kotagede	15.997	23.297	3,83 %
Gondokusuman	57.067	56.561	-0,09 %
Danurejan	26.246	23.430	-1,13 %
Pakualaman	14.309	12.181	-1,60 %
Gondomanan	20.105	17.659	-1,29 %
Ngapilan	22.403	20.494	-0,89 %
Wirobrajan	25.312	26.975	0,64 %
Gedongtengen	26.058	22.825	-1,32 %
Jetis	32.669	30.603	-0,65 %
Tegalrejo	26.624	32.168	1,91 %
Kodya Yogyakarta	394.965	412.059	0,43

Sumber: Kantor Statistik Kota Yogyakarta 1990

Tabel II. 2 di atas menunjukkan dengan betapa tingginya angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Yogyakarta pertahun menurut Kecamatan. Sampel diambil selang sepuluh tahun, yaitu dari data antara tahun 1980 dan 1990.

Selanjutnya perlu pula lihat perbandingan antara angka pertambahan penduduk karena lahir dan datang dengan berkurangnya penduduk karena mati dan pergi dari kota Yogyakarta. Tabel II. 3 berikut merupakan suatu pendekatan kuantitatif berkenaan dengan banyaknya kelahiran dan penduduk yang datang menurut kecamatan di kotamadya Yogyakarta tahun 1990.

TABEL II. 3

BANYAKNYA KELAHIRAN DAN PENDUDUK PENDATANG
MENURUT KECAMATAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
1990

Kecamatan	Kelahiran		Pendatang		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
Mantrijeron	521	29,8	1.227	70,2	1.748	100
Kraton	389	32,2	820	67,8	1.209	100
Mergangsan	454	25,4	1.332	74,5	1.786	100
Umbulrejo	661	19,5	2.723	80,5	3.384	100
Kotagede	356	34,5	675	65,5	1.031	100
Gondokusuman	664	22,3	2.312	77,7	2.976	100
Danurejan	347	27,4	918	72,6	1.265	100
Pakualaman	178	25,7	515	74,3	693	100
Gondomanan	221	27,9	571	72,1	792	100
Ngampilan	312	31,3	685	68,7	997	100
Wirobrajan	371	27,4	983	72,6	1.354	100
Gedongtengen	327	38,8	516	51,2	843	100
Jetis	362	25,3	1.071	74,7	1.433	100
Tegalrejo	403	24,5	1.240	75,5	1.643	100
Kodya Yogyakarta	5.556	26,3	15.588	73,7	21.154	100

Sumber: Kantor Statistik Kota Yogyakarta 1990

Untuk memperoleh gambaran kuantitatif yang lebih jelas maka pada Tabel II. 4 di bawah digambarkan bagaimana pula angka-angka kematian dan penduduk yang pergi per-kecamatan di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 1990.

TABEL II. 4

**BANYAKNYA KEMATIAN DAN PENDUDUK YANG PERGI
MENURUT KECAMATAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
1990**

Kecamatan	Kematian		Pergi		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
Mantrijeron	201	16,0	1.058	84,0	1.259	100
Kraton	198	19,3	826	80,7	1.024	100
Mergangsan	219	16,2	1.132	83,8	1.351	100
Umbulharjo	165	10,2	1.458	89,8	1.623	100
Kotagede	87	15,9	460	84,1	574	100
Gondokusuman	243	10,8	1.926	89,2	2.160	100
Danurejan	157	15,0	899	85,6	1.050	100
Pakualaman	76	3,1	2.363	96,9	2.439	100
Gondomanan	121	17,8	560	82,2	681	100
Ngampilan	145	17,4	688	92,6	833	100
Wirobrajan	158	17,5	745	92,5	903	100
Gedongtengen	187	19,7	760	90,3	947	100
Jetis	128	11,6	977	88,4	1.105	100
Tegalrejo	167	18,3	747	81,7	914	100
Kodya Yogyakarta	2.243	13,3	14.599	86,7	16.842	100

Sumber: Kantor Statistik Kota Yogyakarta 1990

Sesungguhnya data pada tabel-tabel di atas sama sekali tidak mendukung pernyataan awal kita, bahwa penduduk kota Yogyakarta sudah demikian padat karena penambahan penduduknya jauh lebih tinggi dari pada pengurangan. Secara kualitatif penambahan

penduduk pada tahun 1990 hanya tercatat sebanyak 4.312 jiwa (21.154 - 16.842). Pada tahun 1987 jumlah penduduk yang mati dan perlu lebih besar 2.564 dari pada yang lahir dan datang. Sedangkan pada tahun 1988 angka pertambahan naik menjadi 5.156, dan pada tahun 1989 naik lagi menjadi 6.205 jiwa.

Nampaknya kenyataan yang tidak terangkum di dalam data sensus kependudukan ini adalah betapa banyaknya penduduk pendatang musiman yang meramaikan kota Yogyakarta, baik penduduk pedesaan di sekitar maupun para pendatang yang tidak menetap permanen yang berasal dari daerah dan suku bangsa lain. Bagaimanapun data di atas hanya mencakup warga kota yang dianggap sebagai penduduk sah karena memiliki identitas asli, baik kartu keluarga maupun Kartu Tanda Pengenal sebagai penduduk setempat. Sedangkan para pendatang dari pedesaan yang tinggal dalam waktu yang lama relatif beragam umumnya memiliki KTP dari desa asalnya masing-masing. Begitu juga dengan para pelajar atau mahasiswa asal daerah lain, umumnya mereka lebih suka mempertahankan KTP daerah karena berbagai alasan. Belum termasuk para pendatang menetap yang sama sekali tidak melaporkan diri ke petugas yang berwenang.

Sementara itu bukti-bukti kualitatif mengenai kepadatan penduduk kota Yogyakarta dapat kita sandarkan kepada pertumbuhan pemukiman, bangunan-bangunan hunian, perkantoran, pabrik, pasar dan sarana kepentingan umum yang demikian cepatnya. Pertambahan permintaan akan sarana penunjang kehidupan di kota besar seperti kebutuhan air bersih, energi listrik, sarana angkutan penumpang umum, perluasan lokasi pemukiman, semuanya merupakan indikasi makin banyaknya penduduk di lingkungan perkotaan ini.

B. KEBUDAYAAN UMUM LOKAL DAN KEBUDAYAAN DOMINAN

Kemajemukan penduduk Yogyakarta dapat dilihat dari asal-usul penduduknya yang berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan suku bangsa dan keturunan. Sungguhpun tidak pernah lagi dihitung dalam sensus kependudukan nasional, akan tetapi

jumlah penduduk suku bangsa Jawa di Yogyakarta jelas paling banyak. Di antara pemukiman penduduk Jawa itulah berdiam pula berbagai suku bangsa asli maupun keturunan, dalam jumlah yang amat beragam, seperti orang dari suku bangsa Batak, Bugis, Minang, Sunda, Ambon, Keturunan Cina, Arab, India dan sebagainya.

Pertumbuhan fisik kota Yogyakarta termasuk pesat, di mana pembangunan berbagai sarana kebutuhan sebuah kota besar dilaksanakan tidak kalah dengan kota-kota besar lain. Sungguhpun pada awalnya Yogyakarta lebih dikenal sebagai kota pelajar, karena selalu menjadi tumpuan harapan memperoleh pendidikan lebih tinggi dan lebih bervariasi juga di tambah oleh kehadiran pemuda-pemuda dari berbagai daerah lain, akan tetapi tingkat urbanisasi yang semakin tinggi dan semakin lama makin mendorong Yogyakarta menjadi kota dagang dan industri. Ketakseimbangan tingkat urbanisasi, pemekaran kota, dan pembangunan sarana kehidupan yang layak menjadi masalah tersendiri bagi Yogyakarta. Masalah utama berasal dari pertambahan penduduk baik karena kelahiran, maupun karena banyaknya kaum pendatang dari pedesaan dan dari daerah lain. Kepadatan penduduk ini tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan ekonominya, sehingga secara fisik paling nampak terwujud pada pola pemukiman rakyat yang serta berdesak-desakan, semrawut dan bermasalah ketertiban dan kelancaran.

Sementara itu, di bagian tertentu berkembang kehidupan warga yang amat heterogen. Di sana berdiam orang-orang dari berbagai latar belakang bangsa, suku bangsa dan ras. Pemukiman mereka berbaur dengan rumah-rumah penduduk Jawa asli Yogyakarta yang biasanya menjadi pemilik rumah atau pemondokan yang mereka sewa. Tidak heran jika belakang ini ada salah satu bagian di wilayah kota Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan "perkampungan Internasional". Istilah ini memang tidak dikenal oleh semua warga Yogyakarta, akan tetapi sempat dipopulerkan oleh mass media setempat untuk menunjukkan betapa beragamnya penghuni "kampung" di tengah kota Yogyakarta. Tidak ada yang bisa menjelaskan sejak kapan istilah itu di gunakan. Yang jelas di "kampung" tersebut memang didiami oleh berbagai orang asing, seperti orang Korea, Belanda, Jerman, Amerika, Jepang dan lain-lain.

Masuknya orang asing itu tentu dengan membawa berbagai pengaruh budaya terhadap kehidupan masyarakat kota secara keseluruhan. Misalnya saja mengenai berbagai perubahan dalam bersikap dan berperilaku. Terutama dalam urusan penampilan diri, seperti terlihat pada cara berpakaian dan membenahi penampilan diri orang-orang kota Yogyakarta. Sebagian warga masyarakat seakan-akan terpesona dan akhirnya ikut menjadikan dirinya bagian dari budaya berpenampilan "turisme". Hal ini dapat dimaklumi, betapa para wisatawan asing yang berkunjung beberapa lama umumnya berasal dari negara-negara maju dan kaya, seperti Eropa, Amerika, Australia dan Jepang, dalam pandangan sebagian orang adalah para wakil pembawa citra "kemajuan".

Kebutuhan rekreatif yang mereka kejar jauh-jauh dari negaranya selalu dibarengi dengan penyesuaian diri dengan suasana iklim dan kesantiaian. Pakaian yang mereka pakai sebenarnya adalah pakaian santai yang memang dirancang untuk penduduk dari bagian dunia beriklim sedang untuk hidup beberapa lama di bagian dunia beriklim tropis seperti Indonesia. Akan tetapi citra "kemajuan" yang mereka sandang menyebabkan sebagian orang Indonesia beranggapan, bahwa itulah "merek" atau stempel kualitas yang patut ditiru. Sebagian generasi muda Yogyakarta terlihat demikian bergairah meniru cara berpakaian santai para wisatawan asing. Sehingga peniruan perilaku dalam hal budaya pakaian santai ini adalah hal yang biasa ditemukan di tengah kehidupan masyarakat urban Yogyakarta. Seperti perilaku laki-laki yang ikut memakai anting-anting, kalung dan berbagai perhiasan yang layaknya untuk wanita pada umumnya. Begitu pula halnya dengan cara berpakaian santai yang menurut standar nilai budaya sebagian masyarakat kita dapat dikategorikan tidak rapi, ternyata juga ditiru oleh sebagian warga masyarakat kota ini.

Sesungguhnya, betapapun pengaruh kontak-kontak kebudayaan dengan warga negara asing melalui turisme (kepariwisataan) tersebut merupakan salah satu aspek dinamis yang memang dibutuhkan untuk menghidupkan inovasi dan pengembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional Indonesia. Karena selalu ada segi-segi positif yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemajuan taraf hidupnya, walaupun diakui bahwa dampak negatif selalu yang lebih mencorong

dan nampak lebih dulu. Dalam hal peniruan budaya pakaian santai seperti di atas secara tidak terduga ternyata telah mendorong berbagai inovasi di bidang ekonomi dan seni-keterampilan kota Yogyakarta

Siapa yang tidak tahu, bahwa berkunjung ke Yogyakarta tidak akan lengkap nostalgianya tanpa berkunjung dan belanja di kakilima Jalan Malioboro yang terkenal itu. Di sepanjang jalan ini, sejak dari pagi hingga awal malam, digelar orang berbagai barang dagangan berupa pakaian santai, aksesoris atau perhiasan, dan perlengkapan perjalanan (*travelbags*). Inilah perwujudan kreativitas penduduk Yogyakarta yang terangsang untuk bangkit bersamaan dengan derasny arus kunjungan wisatawan asing dan domestik ke kota "keraton" itu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor ekonomi rakyatlah yang digelar orang di kaki lima tersebut. Akan tetapi sektor ekonomi kaki lima jalanan yang sering di kategorikan sebagai sektor informal itu pula yang menyelamatkan kota Yogyakarta dari pengangguran besar-besaran. Sementara itu, di zaman moderen sekarang setiap benda ekonomi akan memiliki nilai jual tinggi jika juga memiliki bobot kualitas seni. Barang-barang yang dijual di sepanjang kaki lima Jalan Malioboro tersebut sebagian besar merupakan hasil daya kreasi masyarakat kota Yogyakarta sendiri. Para pengusaha dan seniman jalanan itu tahu bahwa benda kenangan mestilah mengandung lambang-lambang atau tanda-tanda tempat asalnya. Tidak heran jika tekstil dan busana yang diolah dengan kerajinan batik, kulit dan ukiran logam mendominasi barang-barang dagangan di kaki lima tersebut.

Dari sudut sosial, kenyataan di sektor ekonomi rakyat di atas menunjukkan betapa masyarakat Yogyakarta benar-benar telah berkembang menjadi masyarakat heterogen dengan dominasi kebudayaan asli setempat, yaitu kebudayaan Jawa Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena terbukti bahwa orang-orang yang terlibat di sektor ekonomi rakyat tersebut bukan hanya orang Jawa, tetapi juga penduduk kota yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa lain di Indonesia. Hasil kerajinan tangan boleh jadi memang buatan orang-orang dari Kota Gede yang terkenal dengan kerajinannya, akan tetapi pedagang yang medistribusikannya di sepanjang kaki

lima Jalan Malioboro adalah orang Minangkabau, Sunda, Batak atau Madura. Pembagian kerja dan spesialisasi seperti itu juga terjadi di banyak sektor ekonomi kota lainnya. Orang-orang dari suku bangsa lain boleh terlibat, akan tetapi lambang-lambang yang menjadi bagian dari nilai budaya yang diterapkan tetap menunjukkan dominasi kebudayaan Jawa.

Sebagai kota yang heterogen pemakaian bahasa daerah dan bahasa asing mudah ditemukan di kota ini. Kebudayaan dominan memang kebudayaan Jawa, dan pendukung bahasa daerah ini sendiri hampir tiga perempat penduduknya. Walaupun bahasa pengantar resmi di sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi dan kantor-kantor pemerintah serta swasta adalah bahasa Indonesia, akan tetapi penduduk pendatang yang menetap biasanya akan ikut berbahasa Jawa dalam pergaulan dengan mayoritas penduduk asli daerah.

Bahasa Jawa dengan **unggah-ungguh** atau tingkat pemakaian bahasa dalam kehidupan sosialnya mau tidak mau juga dipelajari dan digunakan pula oleh penduduk pendatang yang berdiam untuk waktu relatif lama. Dorongan bagi pendatang untuk memakai bahasa Jawa juga disebabkan oleh dominasi kebudayaan Jawa itu sendiri. Untuk bisa bergaul dengan berbagai golongan dalam masyarakat Jawa di Yogyakarta maka para penduduk dari suku bangsa lain hanya mungkin mengembangkan komunikasi dengan berusaha belajar bahasa Jawa. Sering kita temui, bagaiman kaum pelajar atau mahasiswa yang sudah fasih berbahasa Jawa. Hanya saja bahasa Jawa golongan pendatang ini akan ditentukan tingkatan pemakaian bahasa **alus (krama)**, **media**, dan **ngoko** oleh lingkungan pergaulan yang mereka masuki.

Pengaruh kehadiran dan kontak-kontak budaya dengan kalangan wisatawan asing juga nampak dalam perkembangan kemampuan penduduk Yogyakarta berbahasa asing tertentu. Para penduduk yang pekerjaan menjadi pemandu wisatawan ikut merebak sejalan dengan perkembangan jumlah kedatangan wisatawan, berkembang pula kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam kehidupan masyarakat urban Yogyakarta sehari-hari, kelancaran para pemandu wisata berkomunikasi dengan orang asing mempergunakan bahasa Inggris

adalah hal yang sudah biasa. Bahasa Inggris tidak saja dipakai oleh kalangan yang memiliki latar pendidikan baik, tetapi juga digunakan oleh mbok-mbok yang berjualan di kakilima pasar-pasar ataupun oleh para pengemudi becak yang memang sering melayani wisatawan asing. Walaupun mereka hanya mampu menggunakan atau menguasai beberapa patah kata saja, menurutnya sudah cukup untuk modal mereka berkomunikasi demi meraup sedikit imbal jasa.

Sebagian di antara penduduk pendatang dari daerah dan suku bangsa lain itu akhirnya ada yang kawin dengan penduduk daerah asli Jawa. Dalam kondisi perbauran sosial serta amalgamasi ini dominasi kebudayaan Jawa tetap terlihat, karena pasangan tersebut akan cenderung menggunakan adat kebiasaan dalam budaya Jawa dalam kehidupan mereka berkeluarga. Begitupun halnya dengan sebagian orang asing yang semula datang dan menetap beberapa lama di Yogyakarta hanya untuk tujuan berdarmawisata, akhirnya ada yang menikah dengan pemuda atau gadis setempat. Sebagian dari warga masyarakat Yogyakarta asli Jawa memang ada juga yang merasa bangga bila mereka dapat menikah dengan orang asing. Umumnya mereka beranggapan bahwa semiskin-miskin orang asing tetap lebih mampu ekonominya dari pada orang Indonesia. Di antara pasangan kawin campur antar bangsa tersebut ada yang langsung dibawa pulang ke negeri asalnya dan ada pula yang lebih senang menetap di kota itu. Biasanya perkawinan demikian dilaksanakan dalam adat Jawa, dan kalau menetap mereka akan cenderung menjalankan bahtera rumah tangga berdasarkan adat istiadat Jawa.

Penyerapan pengaruh kebudayaan asing tidak selalu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kebudayaan setempat. Apalagi kalau kebudayaan setempat itu tidak memiliki daya selektif yang berasal dari kekuatan jatidiri warga masyarakat pendukungnya sendiri. Dampak negatif kebudayaan asing di kota Yogyakarta bagaimanapun merupakan risiko dari kontak-kontak kebudayaan yang tidak bisa ditolak begitu saja. Berbagai sistem budaya asing yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia seluruhnya sudah bukan sesuatu yang "asing" lagi ditemukan dalam kehidupan sebagian warga masyarakat kota Yogyakarta.

Penggunaan pedoman bertingkah laku atau acuan bagi perilaku yang cenderung berorientasi kepada sistem nilai budaya yang terlalu bebas dan liberal sudah merupakan suatu gaya hidup tersendiri bagi sebagian generasi muda kota ini. Mereka mengkondisikan gaya hidup metropolitan secara eksklusif dengan benteng-benteng kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, nilai-nilai dan norma pergaulan antar lawan jenis yang dianggap sakral dalam banyak sistem nilai budaya daerah, seringkali dipertentangkan dengan norma-norma pergaulan bebas yang secara salah kaprah dianggap sebagai ukuran "kemajuan", dan langsung ditiru melalui kontak-kontak budaya sepiantas dengan orang luar tanpa sensor dari dalam diri sendiri.

Pelacuran, perjudian dan mabuk-mabukan seakan-akan telah menjadi pelengkap yang tidak bisa ditolak dari dampak perkembangan kota Yogyakarta. Mayoritas penduduknya yang terdiri dari generasi muda seakan-akan menjadikan kota ini sebagai arena pencarian identitas individual secara sendiri-sendiri. Sebagian di antar mereka berbuat demikian jauh karena sistem kontrol budaya yang biasanya dipegang oleh orang tuanya terlalu jauh untuk bisa memberikan pengaruh. Pola tingkah laku yang sering merugikan masyarakat sekitar bukan tidak ditangani oleh aparat keamanan. Akan tetapi keragaman penduduknya sering membuat berbagai tindakan penanganan menjadi sulit dan rumit, ditambah lagi oleh tingginya tingkat mobilisasi penduduk yang datang dan pergi dari kota tersebut. Pendetang-pendetang dari luar terkadang membuat onar atau meninggalkan bekas perbuatan yang mengganggu, lalu pergi begitu saja tanpa dapat diamankan lebih dulu.

Gambaran di atas menjadi bagian peralihan bagi uraian kita, untuk masuk kepada penjelasan mengenai tipe masyarakat kota Yogyakarta yang dapat pula kita kategorisasikan sebagai masyarakat peralihan. Betapa perubahan akibat berbagai faktor luar dan dari dalam kebudayaan setempat telah menyebabkan pola kehidupan masyarakat beralih dari acuan kejawaan yang dekat dengan kehidupan petani, kepada acuan perkotaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat industri.

C. MASYARAKAT PERALIHAN

Di bagian atas telah kita lihat gambaran bahwa masyarakat kota Yogyakarta selain dicirikan oleh kepadatan penduduknya, tingkat mobilitas yang tinggi, dan kontak-kontak kebudayaannya yang luas dan terbuka, serta masih adanya satu kebudayaan setempat yang tetap dapat dianggap dominan sebagai acuan nilai-nilai dan norma-norma perilaku sosial warga kota secara umum. Akan tetapi, selain itu kita juga masih bisa menambahkan satu ciri lain yang juga melekat pada kehidupan sosial-budaya masyarakat kota Yogyakarta pada masa sekarang, yaitu ciri sebagai salah satu masyarakat yang sedang mengalami peralihan pola kebudayaan.

Setelah lima kali tahapan pembangunan nasional lima tahun terencana, masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengayunkan langkah--langkah kepada terbentuknya masyarakat yang mandiri. Bersama dengan itu terjadilah pergeseran pola-pola kebudayaan di berbagai tingkat kepada pola kebudayaan yang lebih baru dan lebih sesuai dengan perubahan lingkungan secara global. Masyarakat kota Yogyakarta pada awalnya adalah masyarakat urban yang amat menggantungkan kesinambungan hidup melalui daya tahan dan pemasokan sumber daya dari daerah pedesaan sekitarnya. Namun tekanan arah pembangunan kepada kehidupan industri, telah semakin ketergantungan kota Yogyakarta dari hasil pertanian desa-desa sekitarnya. Sedikit demi sedikit kota ini makin masuk ke dalam kondisi kehidupan dengan pola kebudayaan industri, meninggalkan di belakang pola kebudayaan agraris lamanya. Strategi pembangunan nasional memang sedang diarahkan kepada target tercapainya tingkat kehidupan nasional yang sejahtera melalui pemantapan sistem kehidupan masyarakat industrialis. Karena pola kebudayaan yang demikianlah yang dianggap para ahli sebagai satu-satunya pilihan bagi kelangsungan hidup seluruh bangsa. Misalnya saja, merupakan suatu masalah yang amat penting bagaimana memberi makan dan kesejahteraan bagi berjuta-juta penduduk Indonesia yang terus bertambah dan bertambah lagi. Sementara itu pola bagi tingkah laku pada masyarakat agraris yang telah turun temurun diwarisi oleh sebagian besar bangsa Indonesia memang berbeda dengan pola bagi tingkah laku masyarakat industri, lagi pula tidak mungkin dihapus

sama sekali. Sebagian dari nilai-nilai budaya luhur produk kebudayaan agraris telah menjadi jatidiri bahkan mengakar dalam kebudayaan nasional Indonesia sendiri.

Lihatlah betapa peralihan tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta. Salah satu ciri mencolok dalam perikehidupan warga kota pada era industri ini adalah perkembangan sikap dan jiwa persaingan yang semakin ketat. Perlombaan dan kompetisi dalam mencapai nilai tertinggi dalam kesuksesan hidup menjadi gaya hidup perkotaan yang dibarengi oleh semakin besarnya tuntutan bagi disiplin diri.

Peledakan jumlah penduduk sekaligus telah meningkatkan permintaan akan kebutuhan, sedangkan keterbatasan sumber daya alam hanya mungkin dihadapi dengan melakukan pengolahan bahan baku secara massal, dan dengan teknologi yang presisi, dan tingkat ketepatan yang tinggi. Pergelutan manusia dengan benda-benda hasil inovasi industri dan kreasi masal itulah yang sering dikaitkan orang dengan sifat manusia industri yang materialistis. Karena dalam dunia industri segala sesuatu selalu dikaitkan dengan benda, dan perhitungan akan kesempatan atau waktu yang jumlah semakin terasa terbatas.

Perkembangan kehidupan ke arah sikap dan perilaku layaknya masyarakat era industri demikian juga sudah dialami oleh sebagian warga masyarakat kota Yogyakarta. Dikatakan sebagian karena ciri-ciri sikap dan perilaku yang terbawa dari pola kebudayaan agraris masih tertanam dalam diri sebagian warga masyarakatnya. Sementara itu golongan masyarakat yang sudah memilih gaya hidup urban modern tetap saja belum bisa meninggalkan bagian-bagian tertentu dari nilai-nilai budaya lamanya. Begitu pula halnya dengan sebagian masyarakat yang berbudaya semi agraris, bagaimanapun mereka juga harus menyesuaikan bagian-bagian tertentu dari aspek kehidupan mereka dengan tuntutan pola kebudayaan kota yang cenderung ke arah industri. Dalam kategori ini dapat pula kita masukkan apa yang terjadi pada sikap dan perilaku antri warga masyarakat kota Yogyakarta pada umumnya. Betapa sikap dan

perilaku antri tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan sistem nilai budaya industri, namun sebagian lain masih dipengaruhi pula oleh sistem nilai budaya lama yang berakar pada kebudayaan agraris. pula oleh sistem nilai budaya lama yang berakar pada kebudayaan agraris.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa sebagian besar warga masyarakat Yogyakarta adalah kaum pendatang dari desa-desa di sekitar kota itu sendiri. Kesempitan hidup pedesaan mendorong banyak warga masyarakatnya meninggalkan kampung halaman, terutama pada masa-masa paceklik di mana hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup. Banyak di antara mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sambil sampai kondisi di desa baik kembali. Sementara itu keinginan untuk datang ke kota, juga disebabkan oleh biasa harapan yang dipancarkan kota. Kota demikian banyak menjanjikan peluang bagi keberhasilan, atau paling tidak lebih memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup dari pada kehidupan di desa yang hanya tergantung kepada hasil pertanian. Kalau mereka sudah bosan hidup di kota yang penuh dengan perjuangan hidup yang keras, mereka akan kembali ke desa semauanya.

Sementara itu warga masyarakat di kota Yogyakarta sendiri hidup dalam berbagai tingkatan kedudukan sosial yang kompleks. Karena selain adanya unsur-unsur klasifikasi sosial menurut profesi dari kebudayaan urban industri, juga masih ada pengklasifikasian warga masyarakat ke dalam tingkat-tingkatan kedudukan sosial tradisional. Puncak status sosial dari kebudayaan asli ini adalah para warga lingkungan keraton Yogyakarta yang menjadi panutan warga masyarakat Jawa di Yogyakarta umumnya. Tradisi keraton Yogyakarta sendiri berpijak pada sistem kehidupan rakyatnya yang agraris. Kepatuhan mayoritas penduduk kepada warisan nilai-nilai budaya kejawaan itulah yang masih mendasari norma-norma dan moral, serta etika sosial-budaya setempat.

Mayoritas pendukung tersebut mengukuhkan pula tradisi keraton dan kejawaan sebagai sistem nilai budaya yang dominan di kota Yogyakarta. Dengan demikian, hal itu juga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menanggapi perubahan hidup di

kota tersebut. Misalnya, keharusan untuk menepati janji dan ketepatan waktu merupakan suatu sikap sosial yang sering menjadi ukuran nilai diri individu moderen, tetapi bagi sebagian besar warga masyarakat kota Yogyakarta hal ini masih merupakan suatu perkara yang belum melekat dalam alam pikiran mereka.

Masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Yogyakarta khususnya, sedang mengalami peralihan dari kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri. Pola-pola tingkah laku pada masyarakat memang agraris yang telah turun-temurun dalam beberapa generasi memang berbeda dengan perilaku pada masyarakat industri.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat pada era industri ini adalah persaingan yang semakin ketat. Hal ini dikaitkan karena benda, kesempatan atau waktu jumlahnya sangat terbatas, sedangkan orang yang sangat membutuhkan terlalu banyak. Keadaan ini juga terlihat pada masyarakat Yogyakarta, dimana orang terlihat antri untuk memenuhi kebutuhan yang sama dalam waktu yang bersamaan, karena sama-sama berkepentingan memenuhinya.

Adanya tuntutan waktu pada masyarakat Yogyakarta, saat ini sudah mulai terlihat, misalnya banyak orang datang ke kantor pos pada malam hari, karena pada siang hari mereka tidak ada waktu. Hal ini memang berbeda dengan kebudayaan masyarakat agraris yang mempunyai persepsi waktu yang sangat rumit. Misalnya adanya waktu-waktu tertentu yang menurut kepercayaan termasuk hari yang baik untuk melaksanakan sesuatu dan ada pula waktu yang kurang baik.

Sedikitnya golongan penduduk yang berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis perkotaan serta bekerja di industri-industri yang ada, menyebabkan pula hanya sedikit dari sekian banyak warga masyarakat kota Yogyakarta yang tertuntut untuk memiliki mental penuh daya saing. Akan tetapi karena mobilitas golongan yang sedikit ini jauh lebih tinggi, maka merekalah yang selalu nampak menjadi motor penggerak dinamika kemajuan kota. Golongan mayoritas yang tinggi karena tidak menonjol sering pula dianggap sebagai yang minoritas.

Namun seperti telah ditekankan dari awal tulisan ini bahwa tembok pembeda kedua kategori masyarakat sama sekali tidak tegas, dan bahwa perbedaan tersebut amat relatif, karena mobilitas kelas sosial juga perlu dilihat sebagai gejala lain dalam masyarakat peralihan. Artinya berbagai penyesuaian diri tetap dikembangkan oleh warga masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan sosial dan fisiknya. Kategori masyarakat yang dikatakan bercorak kebudayaan agraris tidak selamanya terpaku dalam pola tradisional mereka. Sama halnya seperti kategori masyarakat yang dapat digolongkan sebagai bercorak kebudayaan industri, dalam kenyataan masih menjalankan berbagai nilai budaya lama yang berakar dari kebudayaan agraris itu sendiri.

Kembali kepada kaitan antara ciri kehidupan masyarakat peralihan dengan perkembangan perilaku antri, memang tidak dapat diabaikan arti pentingnya sang "waktu" bagi sebagian warga masyarakat. Dinamika kehidupan kota ini sendiri makin semarak oleh kesibukan manusia-manusia pelaku dan pelengkap pelaku industri dan bisnis pada umumnya. Keterbatasan waktu yang mereka miliki mulai banyak mendapatkan perhatian aparat pelaksana administrasi dan pelayanan masyarakat resmi. Misalnya saja, bagaimana pada masa sekarang sudah semakin banyak orang datang ke kantor pos pada sore sampai malam hari, karena pada siang hari mereka tidak ada waktu untuk urusan seperti itu.

D. NILAI-NILAI BUDAYA KEJAWEN DAN PERILAKU ANTRI

Kosekuensi logis dari pernyataan-pernyataan teoritis di atas, bahwa masyarakat kota Yogyakarta dicirikan oleh adanya satu kebudayaan dominan, adalah kuatnya pengaruh kebudayaan dominan yang bersangkutan terhadap mentalitas, sikap dan perilaku sehari-hari sebagian besar warga masyarakatnya, berkenaan dengan kajian kita tentang masalah sikap dan perilaku antri, sudah selayaknya dikaitkan pula dengan sistem budaya dari kebudayaan dominan tersebut. Adakah nilai-nilai budaya Jawa "keraton" Yogyakarta yang berkaitan dengan dasar-dasar disiplin sosial seperti

yang terwujud dalam perilaku antri di zaman sekarang? Bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya tersebut terhadap sikap dan perilaku individu pendukungnya di tengah lingkungan perkotaan yang menuntut kedisiplinan individual yang mungkin berbeda dengan kedisiplinan sosial dalam kebudayaan aslinya?

Sesungguhnya setiap sistem nilai budaya manapun memiliki pranata-pranata bagi terlaksana kelancaran dan ketertiban sosial dan tingkah laku individu. Akan tetapi perbedaan sistem nilai budaya yang ada sering membedakan pula cara-cara orang merespon dan menginterpretasikan apa yang disebut dengan lancar dan tertib. Kelancaran dan ketertiban dan menjadi inti dari disiplin diri manusia modern pada pokoknya mengacu kepada ketepatan waktu dan menghormati hak-hak orang lain tanpa memandang perbedaan derajat atau kedudukan sosialnya.

Sistem nilai budaya atau pola kebudayaan Jawa dan Yogyakarta yang sedang menjadi sorotan kita bagaimanapun juga memiliki pranata-pranata pengaturan ketertiban dan kelancaran dalam konteks kebudayaan Jawa itu sendiri. Mungkin ada kesamaan-kesamaan aspek nilai tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membina kedisiplinan masyarakatnya menjadi masyarakat berdisiplin modern tanpa kehilangan jatidiri sebagai orang Jawa. Untuk menggali masalah nilai-nilai budaya ini ada baiknya kita lihat beberapa gambaran tentang bagaimana perilaku lancar dan tertib yang bersumber dari ajaran-ajaran luhur Jawa itu sendiri.

Kebudayaan Jawa secara umum sering disebut orang sebagai Jawanisme atau lebih dikenal lagi sebagai **Kejawen** atau **Kejawaan**. Sebagai suatu sistem Jawanisme atau kejawen tersebut adalah kelengkapan diri setiap individu Jawa, karena di dalamnya berisikan kosmologi, mitologi, perangkat konsepsi mistik yang secara keseluruhan menimbulkan antropologi Jawa sendiri, yaitu sistem gagasan mengenai sifat dasar manusia dan masyarakatnya. Sistem gagasan atau sistem tata nilai budaya inilah yang menerangkan etika, tradisi dan gaya Jawa (Mulder, 1985 : 16).

Tradisi kejawen ini dianggap mencakup suatu referensi filsafat yang sangat luas, mulai dari keyakinan asli, pengaruh Hindu-Budha dan sampai kepada tahapan-tahapan pengaruh Islam yang tetap berkembang dan berkesinambungan sampai sekarang. Sungguhpun mereka sudah memiliki perangkat pedoman bertindak atau referensi bagi tingkah laku yang baru, seperti sebagai orang Indonesia, penganut aliran politik tertentu, pemeluk agama Islam dan sebagainya. Akan tetapi segera setelah mereka berada di lingkungan kehidupan yang dekat dengan keluarga, maka hubungan sehari-hari dalam masyarakatnya mereka cenderung secara sadar atau tidak untuk kembali mengacu kepada kategori pemikiran kejawen.

Namun, yang jelas kejawaan atau kejawen bukan suatu kategori keagamaan, tetapi suatu etika atau gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran kejawaan itu sendiri. Sebagian besar orang Jawa mengaku memeluk agama Islam, sebagian lagi agama-agama minoritas, seperti Protestan, Katolik dan Budha, akan tetapi setiap orang secara bersamaan menjalankan etika kejawen yang sungguh-sungguh. Geertz menggunakan suatu pengkategorisasi sosial bagi orang Jawa yang cukup menghebohkan sebagian kalangan intelektual itu, bahwa ada kategori masyarakat abangan, santri dan priyayi (Greetz, 1960).

Akan tetapi banyak ahli lain setelah itu membuktikan, bahwa sesantri-santri orang Jawa, mereka tetap orang "Jawa", karena mereka dengan fasih juga membicarakan kehidupan dalam perspektif kerangka mitologi pewayangan, memandang ibadah shalat hanya sebagai pertemuan pribadi dengan Tuhan, menghargai **slametan** sebagai mekanisme integrasi yang penting, dan mempunyai rasa kewajiban untuk mengunjungi kuburan orang tua. Dalam pengertian etis mereka tetap mengukur diri sendiri sama seperti orang Jawa manapun, yaitu untuk mengutamakan keikhlasan, **sepi ing pamrih**, yaitu untuk tidak mengikuti kemauan libido dan ego begitu saja (Mulder 1985, Nakamura 1983).

Tidak diragukan lagi, bahwa sistem nilai budaya Jawa dapat dijelaskan oleh orang Jawa dari kalangan mana saja yang memang memperoleh pelajaran mengenai rahasia-rahasia kebudayaan nenek moyangnya. Akan tetapi para ahli tetap berpendapat bahwa sifat

kejawaan itu diwakili dengan baik sekali oleh golongan elite bangsawan dan priyayi lama serta keturunannya. Golongan priyayi ini sendiri menjadi bagian dari kesadaran orang Jawa akan struktur sosial masyarakatnya. Kesadaran golongan ini akan pentingnya kedudukan mereka sebagai simbol sosial kejawaan dipupuk dengan mengutamakan penggunaan acuan kejawaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Bersama dengan kalangan penekun budaya kejawaan secara mendalam orang-orang dari kalangan priyayi inilah yang seakan-akan dianggap sebagai pemelihara warisan budaya Jawa secara mendalam. Mereka adalah orang yang tahu dan dapat mengungkapkannya; mereka adalah orang yang menaruh perhatian dan mampu melaksanakan setiap ketentuan tatanannya. Semuanya itu disebabkan ajaran-ajaran kejawaan itu penuh dengan simbolisme dan ilmu rahasia (**ngelmu**) yang memacu angan-angan dan perenungan.

Salah satu hasil perenungan itu adalah paham lahir mereka terhadap apa yang disebut tatanan kehidupan (**ukun Pinesthi**), bahwa kehidupan adalah suatu keseluruhan yang teratur dan terkoordinasi yang harus diterima dan harus diadaptasi, sehingga hidup yang seirama dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri adalah sikap paling bijaksana. Dengan demikian orang mempunyai kewajiban moral untuk menghormati tata kehidupan. Oleh karena itu orang harus menguasai diri sendiri ke dalam dan keluar, sambil mencoba membentuk kehidupan dengan indah (Mulder 1985 : 24-25). Arah dari pandangan ini adalah sikap **nrimo**, artinya tahu di mana tempatnya sendiri, percaya pada nasibnya sendiri sambil berterima kasih kepada "Tuhan" karena ada kepuasan dalam menikmati apa yang menjadi bagiannya. Dalam sikap ini orang menerima bahwa semuanya telah ditetapkan, orang secara sadar mengikuti rel dari takdirnya yang tidak dapat dihindari lagi.

Tatanan masyarakat seringkali dianggap sebagai suatu mikrokosmos dari tatanan kehidupan di alam semesta. Modal dasarnya selalu mengacu kepada tatanan hidup dalam keluarga. Dengan demikian pranata keluarga merupakan orientasi tatanan

sosial yang paling menentukan bagi masyarakat Jawa. Di dalamnya orang-orang tua mewakili hidup, karena mereka lebih dulu lahir dan mengalami kehidupan itu sendiri. Karena itu pula orang tua memiliki kedudukan moral yang lebih unggul di samping kewajiban yang lebih besar terhadap anak-anaknya.

Menghormati keunggulan moral berarti menghormati "hidup", sehingga menghormati saudara yang lebih tua, orang tua, guru, atasan dan raja adalah sama seperti menghormati "Tuhan". Dalam hal ini nampak jelas betapa tatanan sosial dalam masyarakat Jawa amat ditentukan oleh konsep yang lebih dekat kepada sumber kehidupan, kebijaksanaan moral dan kekuasaan. Sering diungkapkan oleh para pemikir kejawaan, bahwa hidup secara serasi dengan hal-hal yang lebih besar dari dirinya sendiri merupakan tingkah laku moral yang sangat terpuji.

Untuk mencari keselamatan dan tatanan hidup yang tenteram di dunia maka setiap orang Jawa diharapkan memberikan penekanan pada dipertahankannya hubungan-hubungan baik dengan lingkungan sosial. Bagi mereka penting sekali untuk menumbuhkan dan menjaga hubungan baik, sambil tidak menonjolkan diri sendiri kepada orang lain, yaitu dengan melaksanakan kerukunan, menghormati perasaan orang lain, dan khususnya bersikap toleransi mengenai hal-hal yang bersifat keyakinan. **Slametan**, misalnya adalah suatu ritus sosial, sungguhpun diadakan untuk motifasi keluarga, yang sering digunakan untuk menilai kesungguhan orang terlibat dalam lingkungan sosialnya. Termasuk dalam hal ini kemauan baik dan keikutsertaan pada upacara pemakaman atau kegiatan sosial lainnya.

Agaknya pandangan hidup kejawaan atau kejawaan di atas seakan-akan tidak ada masalah dengan pengembangan sikap dan perilaku antri yang menjadi kajian kita. Akan tetapi masalahnya tidaklah semudah membalik telapak tangan, atau mengalihkan kebudayaan Jawa yang utuh ke tengah kebudayaan kota Yogyakarta yang memiliki masyarakat heterogen, padat dan sedang mengalami peralihan pola kebudayaan. Tugas kita sekarang adalah menemukan unsur-unsur penentu dalam masalah disiplin diri yang menjadi salah

satu dasar perilaku antri. Sementara itu dari berbagai prinsip kejawaan di atas, masalah "tatanan" adalah konsep yang mungkin paling bisa menjawab keingintahuan kita mengenai disiplin diri dalam kehidupan tradisional orang Jawa.

Para ahli tentang budaya Jawa umumnya berkesimpulan, bahwa untuk memahami kehidupan orang Jawa, Adalah dengan memahami keinginan mereka agar terciptannya tatanan. Konsep tatanan yang bersumber dari keteraturan alam semesta dan bentuk keluarga sebagai perwujudan aktif paling dekat mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Akan tetapi untuk menghadapi berbagai tatanan dalam sistem kehidupan yang lebih besar dan gaib itu tidak ada lain usaha yang dilakukan orang Jawa adalah untuk tetap berbuat aktif dalam membentuk keberadaan seseorang (**rame inggawe**) sambil bersikap setia akan tempatnya dalam kehidupan ini (Mulder 1985 : 34-35; Magnis- Soeseno 1981 : 125-126).

Sosialisasi tatanan tersebut sudah dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan, dan tentu saja melalui ritus-ritus upacara yang ada dalam adat kejawaan. Misalnya pada saat siap menyambut kelahiran bayi, kedua orang tua memasuki keadaan "prihatin" yang diterjemahkan oleh Koentjaraningrat (1960 :95) sebagai suatu kesadaran yang dipertinggi mengenai peristiwa-peristiwa yang mengganggu. Kedua orang tua mengurangi makan dan melakukan pantangan-pantangan lain dan mengadakan serangkaian **slametan** seperti **slametan mitoni** saat janin berusia tujuh bulan. Setelah bayi lahir delapan bulan dilangsungkan pula slametan **tedhak setim** yaitu upacara anak pertama kali mengijak tanah. Selanjutnya siklus upacara dalam rangkaian tatanan hidup itu akan berlanjut terus sampai dewasa dan mati.

Berbagai upacara itu mempunyai arti khusus bagi pembentukan rasa percaya diri pada si anak. Dasarnya adalah kewajiban orang tua untuk menjadikan anak menjadi "orang" yaitu menjadi anggota masyarakat yang baik dan terhormat. Selama proses pendidikan itu anak harus menjadi manusiawi, yaitu mengikuti aturan-aturan budaya Jawa sambil belajar untuk hidup sesuai dengan itu. Diantaranya ditanamkan rasa malu (**isin**) atau rasa **rikuh**, yaitu

kekuatiran bahwa perilaku atau penampilan diri akan dikritik atau ditertawakan orang lain. Secara positif rasa malu ini akan mendorong bagi perkembangan rasa hormat kepada orang lain dan keinginan untuk menghindari pertikaian dan konfrontasi.

Sikap yang setara dengan itu adalah rasa **sungkan**, yaitu rasa hormat dan sikap menjaga jarak dengan orang yang lebih tua, berpengaruh dan lebih rangka hubungan ayah dengan anak yang berjarak (*avoidance relationship*). Sikap ini antara lain diatur dengan penggunaan bahasa Jawa halus (**krama**) yang resmi untuk berbicara anak dengan ayah. Selanjutnya sikap sungkan demikian berlanjut ketika individu berada dalam masyarakat. Rasa sungkan juga dikembangkan kepada atasan, guru, penguasa, dan golongan priyayi secara hirarkis. Tidakkah sistem nilai seperti ini yang kita sebut sebagai sifat perilaku *primordialisme tradisional*?

Penghargaan luhur terhadap tatanan kehidupan secara hirarkis tersebut cukup relevan dengan dasar-dasar pembentukan disiplin diri. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan Jawa juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mengharuskan setiap individu memiliki kedisiplinan. Sungguhpun begitu, sangat perlu kita sadari bahwa konteks dari kedisiplinan diri kejawaan tersebut tidak selamanya dapat berjalan lancar dalam rangka perilaku antri. Karena dari apa yang kita temukan di lapangan masih banyak diantara warga pendukung budaya kejawaan yang belum mengerti sepenuhnya disiplin dalam perilaku antri.

Secara umum sering dikatakan orang bahwa ajaran-ajaran moral Jawa sudah sejak lama sekali mengandung nilai-nilai kedisiplinan sosial yang mengharuskan setiap orang memiliki kemampuan menahan diri dan mengikuti ketentuan tatanan lingkungan dengan sabar. Mungkin inti dari kedisiplinan tradisional seperti inilah yang selama ini banyak mengajarkan seseorang untuk dapat berperilaku antri secara tertib. Hal tersebut sebenarnya telah ditanamkan sejak seseorang masih kecil baik diberikan oleh orang tua maupun oleh guru-guru di sekolah yang umumnya menekankan agar seseorang itu agar berperilaku sopan dan beradab. Misalnya seseorang akan dianggap tidak sopan bila tidak menginginkan orang lain yang

sedang antri untuk membeli karcis kereta api, lalu tiba-tiba menyerobot. Tidaklah beradab bila seseorang merebut giliran orang lain yang sedang antri untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan mengapa disebagian tempat tetap terjadi pelanggaran dalam masalah ketertiban dan kelancaran antri. Kehidupan kota besar yang keras dan penuh persaingan telah merubah mental sebagian pendukung kebudayaan Jawa menjadi sedikit keluar dari rel tatanan sosial aslinya. Misalnya, betapa sikap **nrimo** dan **sungkan** serta **ngabekti** kepada orang yang lebih tua dan berkuasa sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memenangkan kesempatan untuk melanggar tatanan urutan antri. Bukan rahasia lagi bagaimana sebagian orang dari golongan yang memiliki kekuasaan lebih suka mengambil jalan pintas, melangkahi aturan antri, dan langsung mengambil kesempatan lebih dulu, lebih baik dan lebih mudah. Golongan masyarakat yang terkena atas pelanggaran tersebut juga tidak merasa perlu mengkritik, apalagi memprotes, karena tatanan sosial tradisional memang mengajarkan orang untuk senantiasa menghindari konflik.

Keteraturan dalam kehidupan sosial juga telah ditanamkan sejak dini, baik untuk diterapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sehingga perilaku orang yang berdesak-desakan tidak berbaris menurut aturan antri ketika berusaha mendapatkan tempat di dalam bus, memang terlihat tidak teratur sehingga mengesankan keadaan yang semrawut dan tidak tertib. Akan tetapi sistem nilai kejawaan seringkali tidak menjadikan masalah tersebut sebagai sesuatu yang mengganggu tatanan sosial, karena secara hirarkis, setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda. Seakan-akan kesemrawutan di tingkat sosial rakyat jelata adalah suatu yang wajar, dan juga tidak dikeluhkan oleh para pelakunya. Sedangkan kelancaran dan kemudahan yang dimiliki oleh golongan atas dapat dianggap sebagai privilege, hak-hak istimewa yang memang sudah digariskan untuk menjadikan milik mereka.

Mengerti perasaan orang lain memang hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang mungkin akan angat tersinggung apabila suasana antri untuk mendapatkan pelayanan di suatu bank, tiba-tiba dirusak oleh kedatangan seseorang yang baru tiba dan langsung maju kedepan barisan orang-orang yang sudah antri lebih dulu. Sungguhpun orang ini sanggup menutup rasa seganya terhadap orang lain dengan memakai "topeng" kekuasaan ataupun keistimewaan lain, namun menurut aturan umum pelanggaran ini amat menyinggung perasaan banyak orang. Akan tatapi pelanggaran seperti ini sulit terjadi di lingkungan perkantoran seperti bank. Sebaliknya orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan kedekatan dan "uang" untuk menghindari antri banyak terjadi di tempat-tempat pelayanan umum bagi rakyat jelata yang sudah terlanjur dikategorikan sebagai golongan yang **nunut**, menurut kepada kemauan yang lebih kuat.

Tenggang rasa (**tepo seliro**) yang tinggi juga merupakan nilai-nilai budaya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih kompleks. Nilai budaya luhur yang sudah ada dalam kebudayaan kejawaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Yogyakarta ini sayangnya sering di salahartikan. Misalnya betapa sering kita lihat orang-orang yang sudah cukup lama berada dalam antrian panjang, akan membiarkan begitu saja orang lain menyelinap dari belakang ke depan, baik dengan basa-basi minta permissi atau tidak. Sebagian warga masyarakat yang memiliki tenggang rasa terlalu besar membiarkan perilaku ini begitu saja sehingga menimbulkan konflik batin pada orang-orang yang sudah mulai memahami hak-hak dan kewajibannya dalam barisan antri. Padahal tenggang rasa yang manusiawi memang perlu pula untuk menolong orang yang sedang hamil atau orang yang sudah berusia tua yang memang perlu untuk didahulukan.

Bagaiman dasar-dasar pemikiran munuju penjelasan di atas belum sepenuhnya kita terima sebelum melihat betapa kondisi antri yang terjadi sebenarnya di tempat-tempat kejadian. Bab berikut akan menjelaskan fakta-fakta empirik yang terekam di lapangan, sehingga dapat kita kaitkan dengan konsep-konsep terdahulu bagi kepentingan analisis khusus.

BAB III

PERILAKU BUDAYA ANTRI MASYARAKAT YOGYAKARTA

A. SIKAP UMUM TERHADAP PERILAKU ANTRI

Sesuai dengan pengertian yang telah kita rumuskan di atas, antri adalah suatu perwujudan sikap kedisiplinan sosial untuk mencapai pelaksanaan suatu kegiatan secara tertib dan lancar. Unsur-unsurnya sendiri terdiri dari adanya sejumlah orang yang secara fisik berada dalam satu lokasi yang sama, pada suatu tenggang waktu tertentu, memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang sama dalam jumlah yang terbatas. Untuk itu diperlukan adanya suatu aturan bagi ketertiban dan kelancaran. Unsur lain yang penting adalah sistem bergilir menurut urutan-urutan kedatangan yang diterapkan, di mana orang yang lebih dulu datang dan lebih siap akan memperoleh kesempatan lebih dulu.

Pengertian tersebut cukup sederhana untuk menjelaskan, apa yang tengah terjadi pada saat sejumlah orang yang bepergian harus menunggu giliran mendapat tempat kesempatan di suatu tempat penyalur kebutuhan umum melalui sistem lokal pelayanan. Misalnya loket-loket penjualan karcis sebagai tanda mendapat tempat di atas kereta api atau bus penumpang umum bagi orang-orang yang bepergian. Dalam rangka pengaturan pembagian kesempatan secara adil untuk memperoleh sumber daya yang terbatas seperti itulah dikembangkan berbagai sistem antri. Sistem antri ini termasuk juga dalam membayar kewajiban-kewajiban seperti membayar uang kuliah, membayar listrik, membayar telepon, untuk mendapatkan

pelayanan medis, pelayanan di kantor pos, bank, maupun untuk memperoleh pelayanan di tempat-tempat hiburan dan di swalayan.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat di kota Yogyakarta telah cukup menyadari betapa keteraturan, ketertiban dan kelancaran suatu pembagian kesempatan amat membutuhkan sistem antri. Namun tidak bisa diabaikan betapa kondisi kehidupan sosial budaya Yogyakarta yang khas juga menimbulkan berbagai pengecualian berkenaan dengan kedisiplinan warga masyarakat dalam masalah antri. Jadi dalam hal ini perlu diberikan perhatian kepada alasan, mengapa masih ada orang yang tidak tertib mematuhi aturan-aturan antri?

Sesungguhnya orang-orang yang belum menyadari pentingnya antri dan memiliki sikap kedisiplinan sosial dalam pelaksanaannya memang ada pada semua lapisan sosial, baik di kalangan masyarakat kelas sosial-ekonomi menengah ke atas maupun di kalangan masyarakat kelas sosial-ekonomi lapisan bawah. Faktor kemampuan ekonomi terkadang tidak dapat dijadikan standar bahwa orang yang lebih kaya akan memiliki disiplin sosial yang tinggi, sebaliknya orang yang miskin tidak berarti tidak memiliki disiplin sosial. Bagaimana pun dimana-mana masih sering kita temukan adanya orang yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain dalam memenuhi suatu kebutuhan atau kesempatan yang terbatas jumlahnya.

Warga masyarakat kota Yogyakarta memang mayoritas orang-orang dari suku Jawa, khususnya warga masyarakat pendukung kebudayaan Jawa Keraton. Mereka menyebut diri Sebagai "wong Ngayogyakarta Hadiningrat", dan pendukung tradisi kejawaan umumnya. Akan tetapi kota ini juga berdiam warga masyarakat yang berasal dari berbagai daerah lain latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda. Kehidupan kota demikian kompleks menyebabkan itu lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial masyarakatnya juga amat beragam. Hal itu ditandai oleh munculnya berbagai tingkatan kedudukan dan peranan sosial. Tingkat mobilisasi penduduk termasuk tinggi, karena arus mereka yang datang dan pergi terasa demikian besar. Ini terbukti dari peningkatan kesibukan di sektor perhubungan dan transportasi yang setiap tahun tidak pernah turun.

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta dalam keberagaman tersebut menjadi sulit untuk dipegang sebagai ruang lingkup perolehan informasi yang bersifat opini. Oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa pengamatan yang mungkin dikembangkan bagi kajian mengenai sikap budaya atau perilaku antri ini akan lebih bersifat deskriptif. Berkenaan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di lapangan, maka pendeskripsian sikap masyarakat umum Yogyakarta terhadap disiplin antri ini selain mengandalkan pengamatan langsung juga memanfaatkan interpretasi terhadap pandangan-pandangan para budayawan, pemimpin masyarakat, kalangan intelektual, dan pejabat pemerintahannya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan dominan serta kemajemukan masyarakat Yogyakarta adalah bahan pertimbangan yang paling umum dipakai oleh nara sumber pemberi masukan.

Kebudayaan perkotaan di Yogyakarta ditandai oleh mayoritas warga masyarakat "Ngayogyakarta Hadiningrat" berorientasi kepada tradisi sinkretisme kehidupan kejawen, yang memperoleh struktur puncak pada kedudukan sosial politik bahkan juga sosial-religius dari golongan priyayi dan bangsawan yang disimbolkan oleh keraton Kesultanan Yogyakarta. Letak keraton yang sebagian dijadikan museum tersebut juga merupakan simbol kebudayaan otokratis kejawen yang dikuasai oleh kaum bangsawan dan didukung secara tunduk patuh oleh golongan rakyat jelata yang mengaku sebagai warganya. Jumlah penduduk pendukung kebudayaan otokratis kejawen yang demikian mayoritas dan dominan menyebabkan para pendatang dari kebudayaan lain terpaksa memberikan sikap mengalah.

Kedominanan kebudayaan Jawa terlihat pada kecenderungan hampir semua penduduk menjadikan sistem nilai budaya Jawa sebagai acuan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Para pendatang yang berdiam dalam waktu relatif lama sedikit-demi sedikit akan beradaptasi dengan suasana kehidupan sosial masyarakat asli Yogyakarta. Mereka akan berusaha memakai idiom-idiom bahasa Jawa, bahkan kalau bisa belajar bahasa Jawa. Tidak cukup sampai disitu para pendatang juga akan berusaha menyesuaikan diri dengan

unggah-ungguh bahasa dan tatakrama, sopan santun orang Yogyakarta. Sebagian akibatnya semakin lama sistem nilai budaya Jawa ikut mempengaruhi sebagian perilaku penduduk bukan asli Jawa. Apalagi kalau mereka berasimilasi melalui perkawinan (amalgamasi) dan mengembangkan hubungan kekerabatan dengan orang Yogyakarta.

Seterusnya untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat Yogyakarta pada umumnya mengenai antri dapat kita tinjau dari golongan-golongan yang mewakili kehidupan sosial perkotaan itu. Pertama dilihat dari sikap golongan masyarakat urban yang berasal dari pedesaan di sekitar kota Yogyakarta. Golongan ini kebanyakan datang secara musiman dan jarang menjadikan Yogyakarta sebagai tempat tinggal permanen. Dalam struktur sosial perkotaannya mereka tergolong rakyat jelata yang lebih banyak tunduk kepada pola budaya tradisional, cenderung konservatif, dan mengagungkan nilai-nilai kebersamaan dan tanpa konflik, bersikap menerima, dan mengembangkan hubungan sungkan dan riku terhadap orang yang lebih berkuasa.

Latar belakang kehidupan ekonomi mereka biasanya adalah petani sawah atau tegalan, baik sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap (buruh) lahan milik orang lain. Pendidikan mereka juga rendah kalau tidak dikatakan buta huruf sama sekali. Mereka datang ke kota terutama pada masa-masa menunggu panen atau kalau terjadi paceklik. Di kota mereka berusaha mencari kerja di sektor-sektor informal, atau di bidang pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Laki-lakinya akan bekerja di proyek-proyek pembangunan fisik, pembuatan gedung, sarana jalan, penggalian dan pemasangan sarana telekomunikasi dan berbagai pekerjaan mengandalkan kekuatan fisik lainnya. Kaum perempuannya biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan kedai atau toko, berdagang sayur atau makanan di kaki lima dan sebagainya.

Berkenaan dengan sikap kedisiplinan dalam perilaku antri, boleh dikatakan mereka pada umumnya sedikit yang tahu, bahwa ketentuan untuk ikut berbaris dalam memperoleh kesempatan menurut-urutan kedatangan dan memenuhi kebutuhan secara

bergantian satu demi satu itu ditujukan supaya pelaksanaan pembagian kesempatan bagi setiap orang dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Sering kali golongan ini tidak menyadari bahwa urutan kedatangan menentukan prioritas pelayanan, sehingga deretan orang-orang dalam barisan yang panjang menunggu giliran dipandang ganjil. Memang mereka kurang mengetahui mengapa diharuskan tertib pada saat antri, karena seringkali arti dari antri itu sendiri mereka tidak mengerti. Tidak heran jika sebagian dari golongan ini akan cenderung bergerombol di depan tempat pelayanan kesempatan. Mereka paling mudah merusak urutan dan tidak tertib lagi apabila terpancing ke dalam kondisi disiplin yang goyah. Hanya sebagian dari mereka yang telah lama beradaptasi dengan disiplin kehidupan kota besar mengerti bahwa berbaris berjajar kebelakang secara tertib apabila akan membeli karcis di loket kereta api akan memudahkan petugas melayani.

Sebenarnya amat naif jika kita katakan golongan masyarakat pedesaan ini sama sekali tidak mengerti masalah ketertiban. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan mereka kepada aturan-aturan dan norma-norma kehidupan kota besar, karena setelah mereka tahu bahwa setiap orang harus antri mereka akhirnya menurut. Ketertiban bagi mereka adalah suasana damai dalam kebersamaan, tidak ada konflik apapun. Antri bagi golongan ini lebih berarti sebagai tatanan umum untuk kebersamaan, artinya sama-sama mau menerima dan menunggu datangnya giliran masing-masing. Disiplin sosial yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah tatanan hidup bermasyarakat yang mementingkan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, sama seperti nilai-nilai keseimbangan hidup paguyuban yang menjadi acuan perilaku sosial setiap individunya.

Golongan kedua adalah kelompok masyarakat kelas menengah yang biasanya ditandai oleh tingkat kehidupan sosial-ekonomi mereka yang lebih baik. Biasanya golongan ini adalah penduduk permanen di kota yang umumnya bekerja di sektor-sektor formal sebagai pengisi strata ekonomi menengah, misalnya sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, anggota ABRI, pedagang menengah, atau pengusaha industri kecil. Latar belakang pendidikan juga sudah

memungkinkan bagi mereka untuk memahami arti kedisiplinan dan tujuan dari antri. Sebagian dari golongan ini termasuk para intelektual yang pernah mengecap pendidikan tinggi, jadi termasuk ke dalamnya para pendidik dan mahasiswa.

Latar belakang sosial yang lebih baik tersebut ternyata belum menjamin bahwa mereka memiliki titik kedisiplinan sosial yang lebih baik pula. Bukan suatu yang ganjil, bahwa orang-orang dari golongan sosial ini yang sering mengabaikan ketertiban yang menjadi unsur pokok antri. Nampaknya dalam hal ini faktor lain yang menggoda orang untuk sabar menunggu dalam antrian. Antara lain karena kedisiplinan dirinya sendiri memang belum kuat, atau hilang kesabaran karena sikap dan perilaku petugas pelayanan yang membuat orang tidak tenang.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa kurangnya ketertiban dalam perilaku antri di kalangan warga masyarakat Yogyakarta yang tergolong menengah-bawah dari sudut ekonomi dan latar belakang pendidikan, ternyata bukan karena mereka tidak mengerti akan arti dari kata antri itu sendiri, tetapi lebih banyak disebabkan oleh ketakdisiplinan diri mereka. Golongan ini akan membuat suasana tidak tertib karena kurang sabar untuk menunggu giliran mendapat kesempatan. Dari golongan menengah ini sering pula terjadi perbuatan memanfaatkan "kesempatan" atau "kekuatan" untuk mendapatkan kebutuhan umum yang terbatas, sehingga merusak tatanan antri. Misalnya saja dari hasil pengamatan bagaimana perilaku golongan yang terlihat sebagai orang-orang dari golongan sosial kelas menengah-bawah pada saat mereka membeli karcis entah di tempat-tempat pelayanan umum ataupun di tempat-tempat hiburan kelas menengah. Sebagian dari mereka tidak segan-segan berdesakan di muka loket dan berebut agar diperhatikan dan didahulukan mendapat kesempatan. Biasanya ketertertiban ini baru akan terkendalikan setelah dari pihak petugas keamanan. tempat pelayanan umum itu sendiri turun tangan mengatur dan menegur. Dengan demikian jelas pula betapa ketertiban dalam perilaku antri juga dipengaruhi oleh kesiapan pihak penyelenggara distribusi kebutuhan umum yang bersangkutan.

Apabila ditanyakan dalam suatu wawancara terbuka dan santai, warga kota Yogyakarta banyak mengatakan, bahwa antri itu memang perlu dilaksanakan di setiap tempat-tempat umum, terutama untuk menghadapi berbagai kepentingan masyarakat modern pada zaman serba cepat sekarang ini. Di masa sekarang orang dituntut untuk dapat memperhitungkan dan menepati waktu. Perencanaan dan penjadwalan kegiatan bagi setiap orang sudah semakin dianggap sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari manusia moderen. Informan umumnya menyadari betapa perubahan kehidupan sosial di kota Yogyakarta meningkat demikian pesat, sehingga pengadaan aturan-aturan bagi ketertiban hidup bersama semakin mendesak pula. Akan tetapi mereka selalu menambahkan, bahwa semua itu hanya mungkin berjalan dengan baik jika ada kerjasama antar masyarakat dengan petugas. Bersamaan dengan itu dari pihak petugas sendiri dalam hal ini juga harus tegas. Ketaktegaan petugas sendiri tidak memiliki kedisiplinan diri, dan tidak mengerti apa yang namanya antri. Kerumunan orang-orang yang sedang antri sering mengomel dan mengeritik dari jauh, karena petugas keamanan memaksa agar semua berada dalam barisan antri, akan tetapi ia tidak malu-malu pula mendahulukan orang yang telah dikenal atau melayani titipan-titipan dengan imbalan "tip". Biasanya hal tersebut terjadi pada hari-hari besar dimana hampir semua orang membutuhkan pelayanan jasa, seperti kebutuhan akan transportasi di stasiun atau terminal.

Berkenaan dengan kesiapan para petugas penyelenggara distribusi kebutuhan umum, informan memberikan komentar tentang sarana-sarana pemandu ketertiban. Misalnya ada yang berpendapat bahwa sarana untuk memaksa masyarakat agar terbiasa berperilaku tertib dalam setiap antri sangat penting diadakan. Tidak perlu terbuat dari bahan-bahan yang bagus, tetapi cukup terbuat dari bahan sederhana seperti dari tali plastik dengan warna mencolok yang dihubungkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Ini kemungkinan akan dapat lebih menertibkan orang yang akan antri. Dengan adanya sarana antri yang dapat dilalui oleh satu orang ini, akan mempersulit orang untuk berebutan, atau saling mendahului. Selain itu adanya sarana

antri tersebut, untuk meningkatkan orang agar dapat menghargai orang lain yang lebih dulu datang, karena tidak semua masyarakat walaupun mendapatkan budaya yang sama akan berperilaku yang sama pula.

Munurut pandangan warga masyarakat yang terlibat antri, sebenarnya secara keseluruhan perilaku antri penduduk Yogyakarta sudah tergolong cukup tertib dan lancar. Hanya saja mereka mengingatkan, bahwa perlu pula dilihat hari-hari atau saat-saat dan tempat-tempat tertentu. Dengan kata lain ada kondisi khusus di mana pelayanan kepentingan masyarakat ini akan mengalami ketidak tertiban. Misalnya keramaian di stasiun kereta api dan terminal bus penumpang di hari-hari menjelang dan sesudah lebaran, atau di kantor-kantor pos, PLN, Telkom dan PAM pada awal-awal bulan. Mereka juga mengakui bahwa di tempat-tempat yang tergolong mewah, seperti Bank, bioskop kelas satu, dan pusat-pusat perbelanjaan mewah perilaku antri orang jauh lebih tertib.

Lebih jauh informan menilai, bahwa di tempat-tempat "mewah" tersebut ruangnya ditata dengan rapi dan apik, serta selalu dijaga oleh petugas (Satpam) berpakaian seragam yang rapi dan selalu siap menertibkan suasana. Tempat-tempat seperti itu mampu membiayai petugas pengaman serta mengadakan perlengkapan pemandu antri yang baik, sehingga menimbulkan rasa segan bagi pengunjung untuk berbuat tidak tertib. Dalam suasana tertib demikian petugas pengamannya sendiri amat jarang turun tangan mengatur barisan antri. Sebaliknya di tempat-tempat hiburan rakyat yang tergolong kelas "rendah" suasananya yang tidak begitu menyenangkan cenderung menimbulkan anggapan "sepele" dari para pengunjungnya. Akibatnya, dalam kondisi seperti ini peranan langsung dari petugas keamanan amat dibutuhkan. Mereka harus setiap saat berada di tempat dan selalu siap mengingatkan orang untuk tetap tertib.

Sementara itu ketertiban antri di lingkungan pusat-pusat pelayanan transportasi umum sering kali menjadi amat situasional. Artinya ketertiban antri bisa saja tiba-tiba terganggu dan menjadi kurang lancar pada saat jumlah orang yang bepergian amat ramai. .

Di sini peranan petugas keamanan jauh lebih penting lagi, karena rambu-rambu ataupun himbauan-himbauan lisan lewat pengeras suara sekalipun tidak lagi dihiraukan oleh gerombolan massa yang mudah terpancing emosinya.

Berkenaan dengan kaitan relevan antara masalah antri dengan pembangunan nasional, para informan sependapat bahwa sebagai bagian dari disiplin sosial perilaku sekali tingkatkan. Sementara itu betapapun pentingnya disiplin masyarakat dalam masalah antri, akan tetapi mereka juga beranggapan bahwa pada saat sekarang sanksi hukum bagi orang yang belum bisa mengikuti antri, juga belum diperlakukan. Karena bagaimanapun pelanggaran-pelanggaran ketertiban dalam perilaku antri yang umumnya tidak di sengaja tersebut bersifat relatif, dan tidak sampai terlalu membahayakan kepentingan umum. Biasanya teguran-teguran lisan secara baik-baik oleh orang lain atau oleh petugas sudah cukup membuat orang yang melanggar kembali tertib.

Secara umum antri pada masyarakat Yogyakarta dapat dikatakan cukup tertib, walaupun ada juga yang masih terlihat ingin didahulukan tanpa melalui antri tetapi tidak begitu mengganggu. Masyarakat Yogyakarta akan cukup toleransi apabila ada yang menyerobot waktu membeli karcis di stasiun itu, adalah orang sudah tua atau orang hamil yang memang memerlukan bantuan. Kadangkang yang banyak tidak patuh pada aturan antri justru generasi muda, seolah-olah mereka tidak mempunyai tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu bila yang menyerobot orang yang tidak perlu didahulukan, maka orang tersebut ditegur secara baik-baik. Begitu pula bila yang melakukan pelanggaran itu orang yang merasa kenal dekat dengan petugas atau titipan-titipan dari orang penting, biasanya pelaku antri akan menegur, sehingga mereka menyadari kekeliruannya.

Antri memang sudah ada sejak zaman dulu. Saat negara kita belum seperti sekarang ini, untuk mendapatkan beras dan minyak tanah harus antri pada saat itu. Selanjutnya pada dekade tahun 1970-an mulai terlihat adanya antri. Bukan lagi untuk mendapatkan beras atau minyak tanah tetapi untuk bepergian atau mendapatkan jasa angkutan juga harus antri. Sekitar tahun 1980-an baru gencar-

gencarnya orang antri dimana-mana, seperti di terminal bus, stasiun kereta api, terutama pada saat Idul fitri, liburan sekolah dan akhir tahun. Selain itu juga terlihat orang antri pada saat membayar listrik, membayar telepon, mengurus sekolah, dirumah sakit dan tempat-tempat hiburan.

Sarana-sarana untuk antri di Yogyakarta memang sudah banyak dibuat orang, antara lain di bank-bank, beberapa bioskop dan kebun binatang. Tempat pembatasan untuk antri itu ada yang terbuat dari dengan bentuk memanjang kebelakang, dan ada juga yang terbuat dari kertas yang bertuliskan untuk mengingatkan kita harus antri. Bentuk pembatasan antri ada yang terbuat dari besi bulat dan ada juga dari besi setengah lingkaran yang semuanya terbentuk lurus kebelakang dan hanya dapat dilalui oleh satu orang saja.

B. PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT

Adalah menarik sekali pandangan sejumlah tokoh masyarakat di Yogyakarta. Secara luas pengertian antri tidak hanya berlaku dalam masalah pelayanan kebutuhan masyarakat umum di tempat-tempat seperti stasiun, terminal atau tempat hiburan. Jadi bukan tempat mengacu kepada keberadaan sekumpulan orang yang berbaris dalam suatu urutan menurut kedatangan agar memperoleh kesempatan untuk dilayani, tetapi juga terjadi di lingkungan intern lembaga-lembaga sosial resmi, seperti adanya orang-orang yang "antri" menunggu kesempatan menduduki lowongan jabatan dalam karir tertentu. Secara resmi kesempatan menduduki jabatan dalam pemerintahan, misalnya, didasarkan kepada prestasi kerja dan sikap pengabdian selama ini. Akan tetapi batasan yang cenderung relatif itu sering menyebabkan orang lebih terpaksa kepada usaha-usaha merebut hati atasan agar dipromosikan lebih dulu dari yang lain.

Pandangan di atas mengungkapkan kepada kita, betapa masalah antri yang terkait kepada kedisiplinan diri tersebut juga perlu ditilik dalam-dalam di antara mentalitas para petugas sendiri. Dalam kehidupan kepegawaian di lingkungan sipil misalnya, terlihat bagaimana jumlah pegawai yang banyak dan terbatasnya efektivitas sistem administrasi yang ada sering menyebabkan diberlakukannya

sistem "antri" secara administrasi, seperti dalam masalah pengelolaan dokumen-dokumen resmi. Karena tidak sabar menunggu pemrosesan dokumen-dokumennya, tidak jarang oknum pegawai tertentu sengaja mendahului giliran orang lain dengan cara menyuap petugas pengelolah. Oknum ini meminta kepentingan dirinya didahulukan, entah melalui pendekatan bujuk rayu, ataupun dengan memberikan uang "pelicin".

Sebagian tokoh masyarakat Yogyakarta memang beranggapan bahwa pengertian antri jangan hanya diartikan sebagai sistem pelaksanaan ketertiban dan kelancaran di tempat-tempat pelayanan masyarakat umum saja, tetapi juga harus dikaitkan kepada disiplin diri petugas. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan ketertiban dan kelancaran sistem administrasi dan birokrasi negara. Menurut mereka, hanya dengan membenahi kedisiplinan para aparat dan petugas pelaksana baru disiplin nasional benar-benar dapat ditegakkan.

Tokoh lain dihubungi untuk dimintai tanggapan, berpendapat bahwa antri itu memang perlu dilaksanakan secara tertib. Hal tersebut merupakan suatu untuk memperlancar suatu kegiatan. Apakah untuk mendapatkan suatu benda, apakah mendapatkan suatu kesempatan waktu yang jumlahnya terbatas, sedangkan yang membutuhkan sangat banyak. Selain itu dengan cara antri orang terhindar untuk merugikan orang lain.

Aturan sanksi bagi pelanggar antri, pada saat ini memang belum perlu diterapkan, karena dengan cara menegur secara baik-baik saja sudah cukup membuat seseorang akan malu. Selain itu unsur kontrol dari petugas memang perlu lebih ditingkatkan, agar orang yang tidak mengerti akan pentingnya sistem antri tidak melakukan kekeliruan lagi.

Berkenaan dengan kaitan antara nilai-nilai budaya Jawa dengan kedisiplinan dan perilaku antri, seorang budayawan Jawa mengungkapkan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari setiap orang Jawa yang baik akan kehidupan sosial sehari-hari setiap orang Jawa yang baik akan menjunjung tinggi prinsip kerukunan. Karena prinsip hidup demikian gunanya untuk mempertahankan keadaan

ketegangan dalam hubungan antar pribadi ataupun antar golongan dalam masyarakat dapat dihilangkan. Untuk itu maka setiap individu dituntut agar bersedia melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan demi keharmonisan hidup bermasyarakat secara keseluruhan.

Informasi beranggapan prinsip kehidupan yang rukun dan harmonis tersebut berlaku dalam masyarakat kota. Dan dia menolak anggapan bahwa prinsip kerukunan dan nilai-nilai budaya Jawa tidak bisa lagi diterapkan dalam kehidupan kota besar seperti Yogyakarta. Karena prinsip kerukunan diperlukan pada bentuk masyarakat apa saja, baik desa maupun kota metropolitan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari. Individu berbicara dengan suara tenang, tanpa emosi dan menghindari konflik serta pertentangan pendapatan yang menimbulkan permusuhan.

Kemudian berkenaan dengan sikap dan perilaku antri informan berpendapat bahwa sikap dan perilaku antri yang baik adalah penerapan prinsip kerukunan hidup tersebut. Perilaku satu atau dua orang yang tidak berdisiplin tidak seharusnya dihadapi dengan sikap baik-baik, dengan suara tenang dan tanpa emosi yang dapat menimbulkan pertikaian. Karena seringkali orang yang sengaja melanggar kebiasaan umum seperti itu memang tidak tahu atau kurang mengetahui pentingnya keteraturan. Bahkan ada juga yang mungkin benar-benar terdesak, sehingga tidak malu-malu mendahului orang lain.

Sebaliknya, sejumlah informan pokok yang tergolong generasi muda intelektual, dan termasuk orang-orang yang bergaya hidup menghargai waktu, beranggapan bahwa prinsip-prinsip lama cenderung terlalu statis, lamban, dan kurang memiliki daya saing. Kesabaran memang diperlukan, tetapi mereka beranggapan bahwa ada batas-batasnya. Misalnya dilingkungan interaksi sosial dalam keluarga, atau dalam situasi tradisional, orang memang harus menyesuaikan sikap. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan persaingan dengan orang dan kelompok-kelompok lain prinsip tersebut hanya menghambat, dan merugikan kepentingan untuk mengejar kemajuan.

Mereka juga beranggapan bahwa dalam situasi kehidupan masyarakat kota Yogyakarta yang sudah demikian kompleks orang boleh berbeda faham, akan tetapi harus satu pendapat dalam menerima ketentuan hukum dan peraturan. Disiplin sosial dan antri dibuat dengan aturan-aturan bagi kepentingan semua orang dan bersifat universal, karena itu hanya mungkin dibuat dengan rasional. Karena pertimbangan akal sehat bahwa kepentingan semua orang perlu diatur dengan tertiblah makanya antri harus diikuti oleh semua orang. Untuk itu mereka mengajukan suatu contoh, misalnya antri berbagai kendaraan, milik berbagai tingkat sosial pada saat lampau lalu lintas sedang menyala merah di persimpangan jalan. Bagaimanapun semua kendaraan itu harus mengikuti peraturan, bahwa tanda lampu menyala merah berarti harus berhenti, dan baru boleh berjalan jika lampu sudah menyala hijau lagi. Pelanggaran akan peraturan tersebut selain merugikan banyak pihak juga menyebabkan jatuhnya keputusan hukum. Namun mereka juga tidak menolak kenyataan bahwa tidak semua sistem antri memerlukan saksi hukum yang sama keras dan beratnya. saksi hukum untuk orang yang melanggar ketentuan antrinya dalam berlalu-lintas tidak mungkin sama dengan saksi hukum bagi orang yang melanggar ketentuan antri di stasiun kereta api atau di terminal bus.

Seorang informan yang pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta menjelaskan hasil pengamatannya mengenai perilaku antri warga masyarakat Yogyakarta. Menurutnya, walaupun Yogyakarta merupakan kota simbol kebudayaan Jawa, akan tetapi sekarang tingkat keragaman sosial masyarakatnya demikian tinggi, dan belum seluruhnya bisa menjalankan kedisiplinan dengan baik dan teratur. Ketidakdisiplinan sosial masyarakat kota tersebut paling kentara terlihat di tempat-tempat ramai, dimana situasi kereta api, di terminal bus, di pasar-pasar dan sebagainya. Dalam situasi yang demikian ramai oleh manusia pengaturan menjadi amat sulit dilakukan, baik dengan pengontrolan oleh petugas sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa publik yang bergerak berdesak-desakan itu sama-sama tidak bisa mengendalikan diri ke dalam aturan disiplin yang sama. Informan menjadi keterlibatan petugas dan penetapan aturan menjadi petunjuk sampai di mana kedisiplinan masyarakat dalam hal antri. Jadi

Jadi semakin banyak dan semakin diperlukan banyak petugas untuk mengatur suatu gelombang massa untuk antri, merupakan pertanda semakin tinggi tingkat kerentanan disiplin massa tersebut.

Dalam kondisi lemahnya disiplin dan kurangnya pengontrolan demikian akan mudah pula bermunculan orang-orang yang lebih suka menyerobot, mendahului orang lain untuk mendapatkan kesempatan pelayanan lebih dulu. "Penyerobotan" hak dan kesempatan orang lain ini bukan saja dengan mengambil alih posisi orang yang lebih dulu datang secara paksa. tapi juga dengan cara menyuap petugas agar mendahulukan dirinya. Cara kedua ini merupakan jalan pintas yang juga melindas hak orang lain, hanya kerana yang bersangkutan malas dan merasa gengsi untuk ikut antri seperti orang lain. Orang seperti ini akan memanfaatkan uang, hubungan sosial dan kekuasaan yang dimilikinya tanpa malu-malu untuk "memaksa" petugas mengistimewakan dirinya.

Informan umumnya menilai bahwa orang yang tidak malu-malu menyerobot hak antri orang lain biasanya berasal dari kalangan yang memang memiliki kelebihan uang, hubungan relasi, dan kekuasaan. Karena merasa status sosialnya lebih tinggi, orang seperti ini seperti tidak merasa "salah" telah menyerobot hak antri orang lain. Sebaliknya para petugas nampaknya tidak bisa menolak tingkah laku yang tidak tahu aturan itu. Nampaknya segi "pamrih", berbuat karena ada imbalan adalah salah satu faktor utama ketakdisiplinan ini.

Informan yang menjadi pengamat ini menilai bahwa ketakdisiplinan masyarakat dalam hal antri ini disebabkan karena masih kuatnya pengaruh sistem nilai budaya lama. Misalnya saja, masalah penyerobotan hak antri orang lain seperti di atas, dari kacamata masyarakat moderen hal ini dapat dianggap sebagai suatu ketakdisiplinan, akan tetapi bagi mayoritas warga masyarakat yang masih terkungkung oleh nilai-nilai budaya lama dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi harus dihormati dan dilayani lebih dulu. Kalau tidak para petugas yang umumnya berasal dari kalangan rakyat biasa tersebut merasa bersalah. Mereka juga merasa tidak enak hati, rikuh atau isin jika tidak memberikan prioritas lebih dulu kepada sanak saudara, atau orang yang dikenal dekat.

Masyarakatnya sendiri hampir tidak pernah memprotes, mungkin karena kondisi demikian seakan-akan sudah wajar dan biasa bagi mereka. Hal itu tidak lain karena mereka juga berada dalam sistem nilai budaya yang sama, dan akan berbuat sama apalagi dirinya yang memainkan peran sebagai penyerobot dan petugas tersebut.

Secara lebih rinci tanggapan-tanggapan para tokoh masyarakat Yogyakarta tersebut di atas kita bandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagian-bagian berikut secara lebih rinci menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku antri warga masyarakat Yogyakarta di berbagai tempat yang memberlakukan antri.

C. PERILAKU ANTRI PUSAT PELAYANAN TRANSPORTASI

Pada masa lampau kebutuhan akan sandang dan pangan yang terbatas telah memaksa orang untuk belajar tentang antri, yaitu pada saat pembagian jatah yang terbatas. Pada masa sekarang tuntutan supaya setiap orang memiliki pengertian dan perilaku tertib dalam sistem antri makin besar di berbagai sektor kehidupan sosial. Kebutuhan di sektor transportasi umum di masa sekarang, misalnya, sering menimbulkan masalah antri yang paling rumit dan besar. Besarnya jumlah warga masyarakat yang membutuhkan kendaraan umum dalam waktu yang bersamaan selalu terjadi setiap tahun. Misalnya pada masa-masa liburan sekolah, di hari-hari sekitar Hari Raya Idul Fitri, Tahun baru dan sebagainya.

Sebagai sebuah kota yang tergolong besar dan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, masalah transportasi umum di Yogyakarta juga terkait erat dengan sistem antri, baik dari kesiapan petugas maupun dari kesadaran dan kedisiplinan diri para pengguna jasa transportasi itu sendiri. Pusat-pusat pelayanan transportasi untuk kendaraan penumpang umum yang terpenting adalah stasiun kereta api dan terminal bus, karena kedua sarana transportasi tersebutlah yang paling banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Tingkat-tingkatan harga karcisnya umumnya dapat dijangkau oleh golongan menengah ke bawah. Lagi pula kereta api dan bus umum melayani lebih banyak tempat tujuan berjarak sedang dibandingkan dengan

pesawat terbang atau kapal laut misalnya. Tidak boleh pula dilupakan, betapa sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa angkutan darat jauh lebih aman dari pada angkutan udara atau laut.

Apabila seseorang pergi keluar kota dengan mempergunakan jasa angkutan kereta api, maka yang pertama kali dilakukannya adalah memperoleh karcis tanda bepergian di tempat-tempat penjualan karcis yang ada di stasiun. Penjualan karcis kereta api ke berbagai arah tujuan di stasiun Yogyakarta dilakukan di delapan buah loket, yaitu empat buah di sebelah kanan dan empat buah lagi disebelah kiri koridor utama. Ke delapan loket tersebut tidak diberi pembatas, sehingga para pembeli harus mau antri menunggu giliran dengan kesadaran dan disiplin sosial sendiri. Locket-loket itu buka mulai pada pukul 07.00 dan langsung melayani calon penumpang menurut tujuan dan jenis gerbong yang diinginkan

Masalahnya antri yang terjadi di terminal bus untuk penumpang umumnya tidak hanya menyangkut perilaku berdisiplin, tertib dan lancar dari para penumpang, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan perilaku para pengemudi kendaraan itu sendiri. Seperti telah diungkapkan diatas bahwa pada saat jumlah penumpang sangat ramai, kondisi tertib, aman dan lancar hanya mungkin terjadi jika antrian dijaga dan dipandu oleh petugas yang jumlah cukup rasional.

Sementara itu dari pihak pengemudi dan petugas bus sendiri kadang-kadang timbul perilaku tidak bertanggungjawab dan sangat tidak berdisiplin karena ingin saling mendahului. Misalnya ingin lebih dulu masuk terminal, ingin lebih dulu mendapat penumpang sampai penuh, ingin mendapat keuntungan lebih banyak dengan menjejalkan penumpang melebihi kapasitas bus, selanjutnya ingin keluar terminal lebih dulu, ingin mengambil penumpang dari jalan lebih dulu dan sebagainya. Jadi petugas keamanan dan ketertiban terminal bus di Yogyakarta selain harus menertibkan penumpang yang semrawut, mereka harus pula turun tangan menertibkan para pengemudi yang ugal-ugalan.

Setiap bus biasanya hanya diberi tenggang waktu sepuluh sampai lima belas menit untuk menaikkan penumpang di terminal, terutama pada masa-masa jumlah penumpang sangat ramai. Akan tetapi pada masa-masa penumpang sepi para pengemudi bus itu lebih suka keluar terminal cepat-cepat, agar bisa mengambil penumpang di jalanan. Padahal cara seperti itulah yang sering menimbulkan kemacetan lalu lintas dalam kota. Alasan untuk keluar dari terminal cepat-cepat berbagai pula macamnya. Misalnya karena alasan untuk mengisi bensin atau peralatan lainnya. Apabila kecurangan tersebut diketahui oleh petugas, maka pengemudi tadi akan dikenakan sanksi.

D. PERILAKU ANTRI DI PUSAT PELAYANAN UMUM

Pusat pelayanan umum yang dimaksudkan di sini adalah lembaga-lembaga atau kantor-kantor yang didirikan secara resmi untuk melayani kebutuhan rutin warga masyarakat pada umumnya. Misalnya Rumah Sakit untuk pelayanan orang berobat, Kantor Pos untuk pelayanan orang membeli benda-benda pos atau untuk mengirim barang, Bank untuk melayani rekening keuangan pribadi atau lembaga pembayaran cicilan rumah atau menabung, Kantor PLN untuk melayani pembayaran rekening listrik, Kantor Telepon untuk melayani masyarakat yang pinjam uang dengan jaminan barang dan sebagainya.

Di Kantor Pos misalnya, perilaku antri warga masyarakat Yogyakarta di tempat pelayanan surat dan kiriman ini terlihat sudah cukup tertib. Orang-orang yang berkepentingan untuk membeli benda-benda pos atau untuk mengirim barang, berbaris berjajar ke belakang di depan loket untuk mendapatkan giliran masing-masing. Walaupun masih ada juga yang berusaha menyerobot untuk dilayani terlebih dahulu, biasanya ditegur tidak saja oleh orang lain tetapi juga oleh petugas. Biasanya orang lupa hak orang lain ini tidak dilayani oleh petugas kecuali jika ia kembali ke dalam barisan antrian. Memang ada juga kenakalan-kenakalan para pengguna jasa pos yang dapat dianggap masih dalam batas kewajaran. Misalnya sebagian dari mereka kerumunan di depan loket atau sengaja tidak ikut dalam antrian, hanya karena ingin tahu apa yang sedang dikerjakan oleh petugas atau karena yang bertugas pada saat itu

memiliki wajah yang cantik. Walaupun orang-orang yang iseng seperti ini tidak mendahului antrian, akan tetapi sikap dan perilaku mereka jelas sudah mempengaruhi ketertiban dan kesopanan tatanan antrian.

Pada masa sekarang ada pula kecenderungan sebagian warga kota Yogyakarta untuk memilih datang ke kantor pos pada malam hari. Alasan mereka selain karena suasana pengunjung pada malam hari jauh lebih sepi dan keadaan lebih tenang, juga karena pada siang hari mereka tidak ada waktu. Boleh dikatakan siang hari sudah mereka gunakan untuk menjalankan kegiatan siang hari dan menyita waktu untuk menjalankan kegiatan rutin yang sibuk dan menyita waktu banyak. Salah satu akibat dari pengaruh era industri memang menjadikan faktor waktu sangat menentukan sekali. Tidak heran kalau sebagian warga masyarakat lebih suka mengurus pengiriman atau pengambilan barang-barang pos sampai pukul 21.00 malam. Pihak Kantor Pos sendiri memang telah memperpanjang waktu pelayanannya sampai pukul 22.00 malam. Biasanya kesadaran warga masyarakat Yogyakarta untuk antri pada malam hari itu sudah cukup baik.

Untuk mengantisipasi ramainya warga masyarakat yang butuh pelayanan pada hari-hari ramai, seperti pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru atau liburan sekolah, pihak Kantor Pos menambah loket-loket untuk melayani para pengguna jasa pos. Pada beberapa dekade yang lalu kantor-kantor pos biasanya dilengkapi pula dengan pembatasan untuk memaksa orang antri. Namun sekarang pembatas itu telah dihilangkan, karena selain merusak pemandangan, juga karena sering dimainkan oleh anak-anak dengan cara menggeser-geser alat itu. Sebagian warga masyarakat mengeritik, bahwa dengan pembatas seperti itu orang-orang yang antri tak ubahnya seperti sapi yang sedang digiring.

Pikiran masing-masing individu warga masyarakat cenderung tidak sama, walaupun menggunakan perangkat pedoman untuk bertingkah laku yang sama, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaannya tidak sama. Misalnya berperilaku mengabaikan kepentingan bersama untuk mendahulukan kepentingan pribadi dengan cara minta didahulukan dan kalau kebetulan keadaan tidak

begitu ramai. Perilaku seperti ini selalu dicari-cari alasan dan pembenarannya. Namun, bagaimanapun mayoritas masyarakat Yogyakarta tidak terlalu ekstrim menanggapi perilaku orang-orang yang "iseng" dikala sedang antri cukup. Mereka juga cukup toleransi untuk mendahulukan orang yang benar-benar terdesak kebutuhannya.

E. PERILAKU ANTRI DI PUSAT HIBURAN

Salah satu daya tarik kota adalah terdapatnya berbagai macam sarana hiburan dan rekreasi bagi segala golongan dan tingkatan sosial ekonomi. Tidak ada kota dimana tidak terdapat tempat-tempat hiburan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan hiburan tersebut bukan saja oleh warga masyarakat kota itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat dari daerah sekitarnya. Demikian juga halnya dengan kota Yogyakarta. Sama seperti kota-kota besar lain di Indonesia Yogyakarta juga memiliki berbagai macam fasilitas hiburan, mulai dari Kebun Binatang, Bioskop, Taman Hiburan dan tempat-tempat rekreasi lainnya, sampai kepada museum-museum dan keraton. Tempat-tempat hiburan dan rekreasi tersebut ada yang memiliki sarana antri yang terbuat dari besi, dan ada pula yang cukup dibuat dari kertas dengan tulisan himbauan untuk antri.

Tempat hiburan dan rekreasi seperti kebun Binatang Gembira Loka dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk, tempat parkir, kamar kecil, warung-warung makanan dan tempat sampah. Kebun Binatang ini tidak saja berfungsi sebagai tempat untuk melepas lelah dan kejenuhan dari pekerjaan rutin bagi orang dewasa, tetapi juga sebagai tempat pengembangan pengetahuan bagi anak-anak maupun remaja, agar mereka lebih mengenal satwa yang kita miliki.

Sebelum pengunjung memasuki lingkungan Kebun Binatang Gembira Loka, mereka harus membeli karcis terlebih dahulu di loket-loket yang terdapat di depan pintu gerbang utama. Perilaku antri pengunjung ketika membeli karcis terlihat cukup tertib, yaitu apabila jumlah pengunjung penuh sesak maka suasana antri mulai terlihat kurang teratur. Sebagian pengunjung terlihat berdiri tidak pada jalur antri atau berjajar ke belakang, tetapi mereka berkerumun di depan loket. Perilaku demikian antara lain karena keingintahuan mereka untuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh petugas di dalam loket tersebut.

Setelah membeli karcis maka pengunjung akan menuju ke ruang masuk kebun binatang melalui pintu gerbang utama. Di tempat itu pengunjung juga harus antri untuk memperlihatkan karcis tanda masuk. Dalam keadaan ramai perilaku pengunjung itu cenderung terlihat tidak tertib. Ada diantara mereka yang tidak berdiri pada jalur antri yang memang hanya muat satu orang, tetapi berdiri dipinggir pagar yang berfungsi sebagai sarana antri. Jika ditanya mengapa ada di antara mereka yang tidak berdiri dalam barisan antrian, maka mereka mengatakan bahwa dia sedang menghitung rombongannya atau ada yang mengatakan bahwa dia hanya sekedar melihat-lihat saja. Bagaimanapun perilaku tidak tertib sebagian pengunjung seperti itu, dan dengan alasan apapun cenderung membuat pemandangan tidak tertib.

Setelah berada di dalam lingkungan kebun binatang tersebut, pengunjung tidak perlu antri lagi, kecuali bagi mereka yang ingin bersantai-santai naik perahu di danau buatan. Untuk itu pengunjung memang perlu antri lagi untuk mendapatkan karcis perahu.

Kategori pengunjung yang amat beragam menyebabkan sarana antri yang terdapat di kebun binatang itu sudah lengkap. Di depan loket penjualan karcis masuk saja misalnya terdapat jalur-jalur pemisah yang terbuat dari pipa besi yang memanjang ke belakang. Jalur-jalur yang hanya dapat dilalui oleh satu orang itu dibuat berjajar sebanyak 10 buah, sesuai dengan jumlah loket penjualan karcis. Kemudian di depan pintu gerbang utama untuk memeriksa karcis tanda masuk terdapat pula sebanyak 2 buah. Selain itu di tempat-tempat tersebut dipasang pula tanda peringatan yang terbuat dari kertas tebal dengan tulisan "Harap Antri" yang ditempelkan di bagian depan kaca loket penjualan karcis. Saran antri ini setidaknya dapat menunjang ketertiban dan memenuhi kebutuhan yang sama pada waktu yang bersamaan.

Keraton Kesultanan Yogyakarta juga merupakan salah satu tempat obyek rekreasi dan hiburan bagi pengunjung dari berbagai daerah, Khususnya bagian keraton yang memang dijadikan museum. Misalnya, beberapa bangunan yang berada di kawasan keraton sekitar pintu selatan, yaitu museum pegelaran Siti Hinggil.

Antri menurut salah seorang petugas penjualan karcis di Museum Keraton Yogyakarta adalah urutan-urutan dalam arti satu persatu untuk membeli karcis, jadi yang pertama datang dilayani lebih dulu.

Untuk bisa memasuki Museum Keraton itu pengunjung juga harus membeli karcis di loket yang telah disediakan. Loket yang berfungsi sebagai sarana antri terbuat dari besi yang bentuk memanjang ke belakang. Disini perilaku antri mereka dapat dikatakan cukup tertib, dan kalau mereka datang berrombongan, mereka tidak antri semuanya tetapi hanya kepala rombongannya saja. hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan tidak ada yang menyerobot dan orang seperti itu ada saja. Kadang-kadang orang tersebut tetap dilayani oleh petugas bila membawa uang pas, sesuai dengan harga karcisnya. Sementara itu pengunjung lain yang mempergunakan uang besar diminta untuk menukarnya lebih dulu, karena petugas tidak memiliki waktu untuk kembaliannya.

Kebijaksanaan mendahulukan pengunjung yang memiliki uang pas demikian itu dibuat oleh petugas untuk mempercepat waktu pelayanan dan untuk memperlancar jalanya antri. Biasanya pengunjung lain yang sedang antri cukup toleransi dalam hal tersebut. Setelah membeli karcis maka mereka harus antri sekali lagi, untuk menuju ruang dalam Keraton. Pada saat itu petugas akan memeriksa karcis dan semua anggota rombongan harus antri, tidak hanya kepala rombongannya

Sarana antri di depan pintu masuk memang tidak ada. tetapi pintu yang dapat dilalui hanya cukup untuk satu orang. Mau tidak mau pengunjung masuk satu-persatu sambil memperlihatkan karcis masing-masing. Biasanya pengunjung akan ramai sekali berkunjung ke museum itu sekitar Hari Raya Idul Fitri, di masa liburan sekolah, dan sekitar akhir tahun. Pada saat-saat seperti itu memang perlu penanganan yang lebih intensif, agar perilaku antri benar-benar berjalan baik.

Menurut petugas yang melayani penjualan karcis tugas di Museum Pagelaran Siti Hinggil Keraton Yogyakarta, pengunjung yang datang melihat-lihat ke sini memang tidak diberi tahap-tahap waktu kunjungan. Jadi tidak dijadwalkan seperti kita akan menonton film

di bioskop. Oleh sebab itu para pengunjung tidak perlu harus berebut kesempatan untuk bisa masuk ke lokasi itu. Jadi walaupun lama mereka dalam memperoleh karcis pasti mereka akan masuk semua. Petugas-petugas pelaksana harian di tempat itu umumnya telah bekerja sejak tahun 1980-an. Semuanya mengatakan bahwa antri memang perlu untuk ketertiban dan kedisiplinan masyarakat.

Sarana hiburan yang mungkin banyak memiliki daya tarik dan paling banyak digemari orang, terutama oleh kalangan mudanya adalah menonton pemutaran film di bioskop. Bioskop-bioskop yang ada di Yogyakarta cukup banyak dan terbagi-bagi pula menurut kelas-kelas pelayanan dan tingkat kenyamanannya. Jadi ada bioskop kelas atas yang mewah dan lebih mahal harga karcisnya. Bioskop ini biasanya hanya memutar film-film luar negeri yang masih baru dan mendapat promosi gencar. lalu ada bioskop kelas menengah dengan suasana kenyamanan sedang dan harga karcis untuk kelas menengah ke bawah. Terakhir adalah bioskop kelas bawah yang biasanya hanya memutar film-film lama. Tempatnya tidak begitu nyaman dan dengan penataan seadanya, sehingga dianggap sepadanlah dengan harga karcis tanda masuknya yang terjangkau oleh lapisan masyarakat kelas "bawah".

Memang tidak semua bioskop mempunyai sarana antri, seperti di bioskop yang tergolong kelas menengah/atas. Di situ hanya terlihat beberapa loket untuk membeli karcis tanpa pembatas sama sekali. Pertama kali kita sampai di bioskop kita akan menuju loket untuk antri membeli karcis. Perilaku antri orang-orang yang akan menonton pada saat itu cukup tertib. Mereka berada dalam urutan antri satu per satu, dan hanya satu atau dua orang saja yang kadang-kadang bergerombol atau tidak berdiri pada jalur antri. Biasanya loket di buka seperempat jam sebelum pertunjukan dimulai. Selama menunggu loket di buka perilaku penonton bermacam-macam tingkahnya. Ada yang duduk-duduk dengan tenang untuk menunggu, ada yang berdiri melihat-lihat iklan film yang akan diputar di bioskop itu, dan ada pula yang lalu lalang disekitar ruangan tersebut. setelah penonton membeli karcis maka mereka harus antri lagi untuk masuk ke ruangan pemutaran film. Petugas akan memeriksa karcis di depan

pintu ruangan, tetapi perilaku penonton terlihat memang cukup tertib, karena pintu masuk itu tidak saja di jaga oleh petugas tetapi juga tidak memungkinkan bagi banyak orang masuk sekaligus dalam jumlah yang banyak.

Kadang-kadang, apabila film yang diputar dianggap sangat bagus, maka jumlah penonton akan ramai sekali. Mereka akan berdatangan dari jauh. Begitu loket dibuka para penonton langsung membentuk barisan antrian di depan loket, untuk membeli karcis agar tidak kehabisan karcis.

Di bioskop untuk kelas menengah, perilaku penontonya dalam antrian juga cukup tertib dan aman. Apabila mereka tidak memperoleh karcis karena telah habis sehingga mereka tidak dapat menonton. Mereka tidak akan membuat kegaduhan, tetapi akan berusaha bertanya sampai berapa lama atau jam berapa lagi film itu diputar. Selain di tempat-tempat seperti ini juga tidak terdapat percaloan karcis dan penontonya cukup patuh pada tulisan yang terdapat di kaca loket yang berbunyi "Penonton Harap antri".

Berbedakan dengan kondisi bioskop-bioskop kelas "bawah" atau murah. Walaupun penontonya juga diharuskan untuk bersikap tertib dan sopan dalam antrian, akan tetapi selalu ada beberapa di antara mereka yang berdiri tidak pada jalur antri. Mereka dengan semaunya berdiri melebar kesisi kiri maupun disisi kanan di depan loket serta berusaha untuk mendahului orang yang sudah lebih dulu antri. Kadang-kadang terlihat juga orang-orang bergerombol disamping orang yang sedang antri, sehingga mengganggu dan terlihat kurang tertib. Begitu pula pada saat akan masuk ruang pemutaran film, mereka tidak membentuk barisan berjajar ke belakang. tetapi ada juga yang saling berebutan.

BAB IV

ANALISIS

A. DISIPLIN SOSIAL MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

Pemahaman mengenai sikap dan perilaku antri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Yogyakarta perlu sekali dikaitkan dengan perkembangan kedisiplinan sosial warga masyarakat yang bersangkutan pada masa kini. Terutama penting sekali diperhatikan bagaimana kaitanya dengan perubahan nilai-nilai, aturan-aturan, pengetahuan-pengetahuan dan sanksi-sanksi sosial yang mewarnai corak kebudayaan kota tersebut. Dalam hal ini adalah tentang bagaimana pengaruh perangkat-perangkat pedoman bertindak atau sistem nilai budaya yang menjadi sumber acuan warga masyarakat setempat dalam menghadapi masalah antri dan disiplin sosial tersebut.

Untuk menjelaskan kaitan antara disiplin diri dan disiplin sosial dengan sikap dan perilaku antri di kota Yogyakarta ini dipakai penjelasan dengan model dikhotomi kebudayaan dominan dan tidak dominan sebagai acuan dan pedoman bertindak utama yang dianut oleh masyarakatnya.

Di bagian-bagian terdahulu telah kita buktikan dengan berbagai argumen, bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki ciri adanya satu kebudayaan yang di dukung oleh mayoritas warga masyarakatnya. Kebudayaan dominan tersebut dapat saja kita sebut sebagai kebudayaan Jawa atau tradisi kejawaan, atau lebih khusus lagi kebudayaan Jawa kraton "Ngayogyakarta

Hadiningrat". Walaupun sama sekali tidak ada data-data statistik ataupun pertanyaan-pertanyaan kuantitatif mengenai seberapa banyak jumlah warga kota yang mengakui diri sebagai suku bangsa Jawa, akan tetapi berbagai pengaruh kebudayaan Jawa dapat ditemui dalam banyak aspek kehidupan sosial budaya warganya. Misalnya saja dalam hal penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulan intim dan akrab, pemakaian tatakrama Jawa dalam interaksi sosial sehari-hari, dan pembuatan-pembuatan kebijakan sosial-budaya yang selalu mengacu kepada tradisi kejawen. Warga kota Yogyakarta yang berasal dari latar belakang daerah dan kebudayaan lain sebagian besar mengakui bahwa norma-norma sosial-budaya yang paling banyak dijadikan acuan dalam interaksi sosial antar suku bangsa hampir selalu cenderung kepada tradisi kejawen.

Kebudayaan mayoritas masyarakat Jawa di kota Yogyakarta pada dasarnya sama saja dengan orang Jawa umumnya. Sungguhpun kelompok masyarakat di sekitar pusat keraton kesultanan Yogyakarta memperlihatkan ciri-ciri tradisi kejawen yang lebih berorientasi kepada sistem feodalisme tradisional, akan tetapi orang Jawa yang berasal dari daerah lain tidak merasa canggung masuk ke dalam pergaulan dalam tatakrama Jawa setempat. Sementara itu pembauran para pendatang dengan penduduk asli Jawa yang sudah berjalan sekian lama menunjukkan pengaruh kebudayaan Jawa lebih kuat. Sehingga ciri kebudayaan kelompok masyarakat pendatang yang masih bertahan dapat kita kategorikan sebagai kebudayaan "pinggiran".

Warga masyarakat kota Yogyakarta yang sangat berorientasi kepada acuan tradisi keraton memiliki ciri bahasa Jawa yang lebih "tinggi", dalam arti selalu menggunakan tingkatan pemakaian bahasa menurut status sosial lawan bicara, atau **unggah-ungguh** bahasa Jawa secara ketat. Perkembangan tingkatan pemakaian dalam tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat Jawa itu sendiri. Hal ini mudah dipahami, karena corak pengaruh kebudayaan Jawa yang feodal paling terasa di pusat-pusat kebudayaan tradisional Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta ini. Sementara itu secara keseluruhan kebudayaan Jawa atau tradisi kejawen pada umumnya berakar dan memperoleh perkembangan dalam pola kebudayaan agraris.

Hal yang menarik dari tradisi kejawen ini adalah sifatnya yang sering disebut oleh ahli sebagai kebudayaan yang sinkretis. Artinya mampu memadukan berbagai pengaruh kebudayaan asing yang terjadi lewat kotak-kotak kebudayaan sejak dulu kala, tanpa menyebabkan unsur-unsur pokok dari kebudayaan asli kehilangan jati diri. Pada masa sekarang kontak-kontak kebudayaan antara orang Jawa dengan orang luar tetap berlangsung dengan segala intensitas dan dinamikanya. Hanya saja corak pengaruh kebudayaan luar yang diterima dan dikembangkan pula oleh warga masyarakat Jawa, khususnya di kota Yogyakarta sekarang lebih ditentukan oleh kegiatan pembangunan nasional terencana. Terutama nilai-nilai budaya baru yang dipromosikan sebagai sumber acuan baru untuk menjadikan masyarakat lebih berorientasi kepada pola kebudayaan industri.

Betapapun perkembangan unsur-unsur sosial dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta, namun akan selalu mengacu kepada suatu tatanan atau keteraturan sosial. Sedangkan sifat mental yang menjiwai dan mendorong kesinambungan aktivitas demikian adalah disiplin diri dan disiplin sosial. Pada awal pengkajian ini sering timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah disiplin diri dan disiplin sosial masyarakat Yogyakarta yang industrialis. Karena konsekuensi dari pertanyaan di atas adalah, bahwa setiap masyarakat mengembangkan mentalitas yang khas, maka disiplin diri dan disiplin sosial suatu masyarakat seperti di kota Yogyakarta haruslah dilihat secara kontekstual. Dimana disiplin diri dan disiplin sosial warga masyarakat yang masih terpengaruh oleh pola kebudayaan agraris harus ditinjau dari sistem nilai budaya agraris itu sendiri. Begitu juga sebaliknya dengan disiplin masyarakat industri.

Sementara itu masyarakat kota Yogyakarta yang pada dasarnya berangkat dari pola kebudayaan agraris kejawen dalam perkembangan sekarang belum pula dapat dikatakan telah menjadi pendukung pola kebudayaan industri sepenuhnya. Sama seperti banyak masyarakat lain di Indonesia corak kehidupan sosial Budaya penduduk Yogyakarta lebih cenderung dikategorikan sebagai masyarakat yang peralihan. Akan tetapi sulit dibuktikan apakah proses perubahan sosial-budaya yang terjadi tersebut benar-benar "mengalihkan" pola kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri.

Karena pengertian peralihan terlalu ekstrim, seolah-olah akan muncul suatu masyarakat baru yang meninggalkan sama sekali pola kebudayaan lamanya. Dengan kata lain kata peralihan terasa semakin tidak sesuai dengan ciri-ciri perubahan sosial-budaya warga masyarakat kota Yogyakarta.

Jika asumsi kita masih dikaitkan kepada sifat kebudayaan kejawaan yang sinkrestis, maka dalam hal pengaruh kebudayaan industri sekalipun pendukung kebudayaan ini akan menyerap secara khusus nilai-nilai budaya industri tertentu. Artinya sesuai dengan sifat kebudayaan kejawaan maka pengaruh kebudayaan industri akan ditambah menjadi penguat dan memperkuat kebudayaan kejawaan. Kebudayaan dikembangkan dengan menyerap unsur-unsur budaya asing yang perlu-perlu saja, sementara itu jatidiri budaya aslinya tidak hilang sama sekali.

Asumsi ini dapat kita lihat pada masalah disiplin diri dan disiplin sosial sendiri. Disiplin pada masyarakat Jawa berangkat dari hasil interpretasi mereka terhadap tatanan sosial yang mengambil pelajaran dari tatanan alam semesta. Sungguhpun dalam alam ada tingkatan-tingkatan, begitu pula dalam kehidupan sosial, akan tetapi semuanya dapat berjalan dengan lancar karena masing-masing menjaga dan menahan. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip utama disiplin pada orang Jawa adalah "keseimbangan" dengan menghindari konflik secara langsung.

Apabila disiplin diri dan disiplin sosial tersebut dapat diartikan sebagai bagian dari pandangan hidup, maka seharusnya dapat pula dikaitkan kepada tiga konsep utama pandangan hidup orang Jawa, yaitu **nrima**, **rela**, dan **sabar**. Konsep pertama, **nrima**, artinya menerima apa adanya, seperti menerima nasib sebagaimana adanya. Misalnya kebahagiaan menurut anggapan ini tidaklah timbul dari benda-benda berharga melainkan oleh sesuatu yang lebih mendalam, yaitu **batiniah**. Kedua, **rela** atau **rela**, artinya bersikap ikhlas atas setiap pengorbanan dan pemberian tanpa mengharapkan pembalasan dari orang lain, tetapi pembalasan dari dalam diri sendiri, berupa kebahagiaan. Ketiga **sabar**, adalah pandangan hidup yang timbul karena melaksanakan sikap **nrima** dan **rela** dengan benar. Inilah yang sering terungkap dalam ujar-ujar tradisional **sepi ing pamrih**, atau

"bebas dari pamrih". Tidak heran jika pandangan hidup kejawen ini amat memusatkan diri pada pendalaman jiwa atau kekuatan **kebathinan**.

Berdasarkan pandangan hidup kejawen di atas maka disiplin diri dan disiplin sosial orang Jawa merupakan pandangan tentang tatanan hidup yang berkesinambungan berdasarkan pendalaman jiwa atau kekuatan batin yang menjadikan setiap orang **mawas diri**, selalu menginteropeksi diri sebagian dari sistem kehidupan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Perwujudannya terlihat dari bagaimana mereka mengamalkan konsep **nrima**, **rela**, dan **sabar**, seperti dijelaskan di atas.

Apakah pandangan hidup yang mungkin dianut oleh sebagian besar orang Jawa menjadi golongan mayoritas juga mempengaruhi pandangan hidup kelompok-kelompok sosial lain di kota Yogyakarta? Sehingga juga mempengaruhi kedisiplinan dalam tatanan kehidupan sehari-hari penduduk kota itu? Jawabnya kita telah singgung di atas, bahwa peralihan kehidupan sosial budaya yang sedang terjadi di kota itu juga menentukan corak kedisiplinan warga masyarakatnya. Artinya, bagaimanapun kedisiplinan sebagian besar penduduk masih berorientasi kepada pandangan hidup **nrima**, **rela**, dan **sabar**, akan tetapi tantangan hidup yang semakin beragam dan didorong oleh aktivitas sehari-hari yang semakin meningkat telah menyebabkan sebagian lain menjadi lebih **kritis** dan bersikap lebih **dinamis**.

Konsep pandangan hidup terakhir ini boleh dikatakan merupakan ciri-ciri nilai budaya kedisiplinan yang dikehendaki oleh masyarakat berkebudayaan industri. Karena konsep demikian amat diperlukan untuk mendorong orang menjadi lebih mampu menyusun dan menyiasati masa depannya dengan program-program terencana. Untuk kemudian melaksanakannya menurut pembagian dan penjadwalan waktu yang ketat dan terjaga. sebagai akibatnya orang tidak mau membiarkan suatu keadaan yang tidak efektif atau tidak berdaya guna terjadi berlarut-larut tanpa menemukan pemecahan dan jalan keluarnya sesegera mungkin. Sikap dan perilaku orang dituntut untuk menjadi dinamis dan cepat tanggap merubah strategi sesuai dengan kondisi lingkungan.

Bagaiman perwujudan kedua pandangan hidup yang kotras tersebut dalam sikap dan perilaku antri warga masyarakat kota Yogyakarta? masalah ini akan kita coba menjelaskan pada bagian berikut.

B. SIKAP DAN PERILAKU ANTRI MASYARAKAT YOGYAKARTA

Sama seperti pemahaman masyarakat di kota-kota lain Indonesia, berkenan dengan peristiwa antri selalu merujuk kepada sejumlah orang yang secara bersamaan berusaha memenuhi suatu kesempatan atau kebutuhan tertentu, atau sumber daya yang tidak mungkin diperoleh secara bebas. Sulitnya memperoleh kebutuhan secara bebas mungkin disebabkan oleh karena kelengkapan atau keterbatasan jumlahnya.

Warga masyarakat Yogyakarta yang senior telah punya pengalaman dengan antri sejak zaman penjajahan dulu. Ketika itu berbagai kebutuhan pokok pernah menjadi sangat langka, sebagai akibat kekacauan tatanan hidup karena perang. Demi ketertiban dan kelancaran penyaluran pemasokan barang kebutuhan pokok tersebut maka diadakanlah ketentuan-ketentuan yang memaksa para pelaku untuk terlibat secara berurutan. Pada masa sekarang peristiwa antri tidak begitu sering terjadi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi terjadi pada berbagai sektor kehidupan lain yang berkembang akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan pelaksanaan antri juga dipengaruhi oleh pengkategorisasian sosial menurut kebudayaan para pendukungnya.

Jika kita kaitkan sikap dan perilaku sebagian warga masyarakat Yogyakarta dengan sistem nilai budaya Jawa atau dengan hidup kejawen di atas, maka akan terlihat bagaimana sikap dan perilaku **nrima**, **rela**, dan **sabar** terwujud di antara mereka. Golongan masyarakat yang memegang prinsip ini cenderung untuk mengikuti barisan yang dengan sikap apa adanya, tidak terburu-buru, dan tidak memprotes ataupun tersinggung ketika ada orang lain yang mendahului dirinya dari belakang, sehingga dapat dianggap seolah-

olah tidak begitu membutuhkan kesempatan. Bagaimanapun ekstrimnya pemberlakuan prinsip ini akan tetapi orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini masih ada di Yogyakarta.

Namun, sesungguhnya sikap dan perilaku yang cenderung "pasif" dan menghindari konflik langsung" dalam pandangan masyarakat maju tersebut tidak banyak lagi dianut oleh warga masyarakat Yogyakarta. Berbagai perubahan serta keterlibatan mereka dalam arus kehidupan yang penuh kesibukan dan persaingan menyebabkan hanya bersikap demikian. akan tetapi sebagai unsur-unsur pokok pandangan hidup kejawaan, prinsip "sabar" demikian tetap dijalankan oleh sebagian besar warga masyarakat dengan sedikit pengembangan. Dalam hal ini mereka sudah berani membela hak demi tatanan dengan tidak lagi menghindari konflik yang ditimbulkan orang lain. Berbagai pengalaman hidup yang penuh persaingan dan kesibukan mengejar waktu menyebabkan mereka sadar bahwa mereka tidak boleh lagi menghindari tantangan. Hanya saja mereka menghadapinya dengan sikap "sabar" dan perilaku "lembut"

Sebaliknya dari sudut pandangan **kritis** dan **dinamis** masyarakat kota metropolitan, kebutuhan untuk memasukkan antri sebagai salah satu cara untuk menertibkan dan melancarkan tatanan kehidupan masyarakat di Yogyakarta terus berkembang. Proses perkembangan kebudayaan kota Yogyakarta dari tradisi yang mengacu kepada pandangan hidup masyarakat agraris kejawaan yang khas kepada kebudayaan yang cenderung mengacu kepada pandangan hidup dinamis dari sistem industri menyebabkan sikap dan perilaku antri dapat dipandang dari kedua sudut pandang tersebut. Artinya ada warga masyarakat yang sikap dan perilaku antrinya mengacu kepada kebudayaan kejawaan dan ada pula yang lebih cenderung kepada cara pandang yang sesuai dengan sistem kehidupan industri.

Bagi masyarakat yang sudah mapan dalam kebudayaan industri maju antri adalah salah satu unsur utama yang mengandung sikap menghargai waktu, menghormati hak-hak orang lain, dan mematuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan sosial demi menjaga kelancaran dan ketertiban sistem kehidupan bersama itu sendiri.

Masyarakat maju juga ditandai oleh pemberlakuan hukum dan undang-undang formal secara ketat, yaitu ada sanksi dan petugas pelaksana eksekusi hukum. Sungguhpun tidak ada suatu peraturan resmi yang diberi kekuatan hukum guna memaksa orang agar mematuhi antri, akan tetapi pada tingkat-tingkat tertentu bisa dikaitkan kepada hukum dasar kepentingan umum. Karena itu pada tempat-tempat tertentu ditempatkan orang petugas-petugas pelaksana ketertiban antri yang biasanya bertindak sebagai pengawas keamanan resmi, seperti petugas satpam di kantor-kantor pelaksanaan masyarakat, atau polisi khusus kereta api di stasiun.

Gambaran tentang konsep antri dalam prinsip kehidupan masyarakat industri seperti di atas jelas bersifat amat resmi. Artinya selalu dikaitkan kepada kejelasan hukum dan sanksinya, sehingga setiap tindakan tidak berdisiplin yang dapat merugikan orang lain dapat dituntut secara hukum. Pemberian kekuatan hukum pada perilaku seperti antri ini sudah diberlakukan secara ketat pada negara-negara maju. Misalnya menindak dengan ancaman hukum setiap kendaraan yang memaksa mendahului kendaraan lain pada saat lalu lintas berhenti karena lampu merah sedang menyala. atau menindak orang yang dilaporkan sengaja mendahului dan menghalang-halangi orang lain dalam suatu antrian yang panjang.

Tentu saja warna kontras sikap dan perilaku antri yang berorientasi kepada dua prinsip tata nilai atau pandangan hidup tersebut tidak terwujud secara nyata dalam kehidupan warga masyarakat kota Yogyakarta. Sungguhpun keduanya seakan-akan menjadi dua kutub perkembangan budaya, pergaulan dan gaya hidup di kota besar ini sudah demikian kompleks, sehingga sikap dan perilaku manusianya dalam segala aspek kehidupan perkotaan juga amat beragam.

Pengkategorian di atas secara kualitatif harus dipecah-pecah lagi kepada sub-sub kategori yang sulit didefinisikan, bahkan secara kuantitatif sekalipun, yaitu kepada tingkat-tingkat kutub pandangan hidup mana kecenderungan orang bersikap dan berperilaku. Disanalah terletaknya dasar pertanyaan sekaligus bukti pamungkas bahwa masyarakat kota Yogyakarta adalah masyarakat peralihan.

Betapa di antara warga masyarakatnya ada pula orang-orang yang cenderung berorientasi atau mengacu sikap dan perilaku antrianya kepada prinsip hidup **sabar**, ada pula yang mengacu kepada prinsip hidup **kritis**, dan ada pula yang berada diantara keduanya. Dalam mereka yang tergolong ke dalam kategori antara ini ada yang pandai memainkan peranan sesuai dengan kepentingan dirinya, adapula yang dapat dianggap setengah-setengah menjalankan prinsip yang satu dengan yang lain.

Dengan pernyataan di atas diperjelas asumsi yang telah ada bahwa sungguhpun ada dua prinsip pandangan hidup yang sedang menjadi kutub peralihan dalam sistem nilai budaya warga masyarakat kota Yogyakarta, akan tetapi coraknya dipengaruhi oleh adanya satu budaya daerah yang dominan dan adanya tuntutan pola kebudayaan baru lebih sesuai dengan perkembangan kota tersebut menjadi kota dagang dan industri.

BAB V

KESIMPULAN

Perangkat pedoman bertindak, atau sistem nilai budaya yang menjadi sumber hidup warga masyarakat Yogyakarta secara mayoritas adalah kebudayaan Jawa. Kebudayaan tersebut menjadi dominan bukan saja karena didukung oleh sebagian besar warga masyarakatnya, tetapi juga karena telah berakar menjadi tradisi setempat yang lebih dikenal sebagai tradisi kejawen atau kebudayaan kejawen. Selain itu kota Yogyakarta adalah simbol tradisi feodalisme Jawa yang dapat pula dipandang sebagai sumber inspirasi kesinambungan prinsip tatanan itu sendiri. Secara umum kebudayaan kejawen ini tergolong ke dalam kategori kebudayaan agraris karena pola kehidupan masyarakatnya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi pertanian tradisional.

Disiplin diri dan disiplin sosial sebagian besar warga masyarakat Yogyakarta yang mendukung kebudayaan kejawen mengacu kepada tiga konsep utama dalam pandangan hidup tradisional yaitu **nrima**, **rela**, dan **sabar**. Pandangan hidup seperti ini bersumber dari kemauan untuk mendalami jiwa atau kekuatan bathin, sehingga dapat juga disebut filsafat kebathinan. Dimana tujuan akhir setiap sikap dan perilaku yang dianggap paling ideal adalah tercapainya tatanan hidup yang penuh keseimbangan, sehingga cenderung menghindari setiap gejala pertentangan faham yang akan menimbulkan konflik langsung dan mengganggu keseimbangan dalam tatanan yang sudah ada.

Sungguhpun mayoritas warga masyarakat Yogyakarta mengacu kepada pandangan hidup demikian, dan karena dominasinya juga memaksa kelompok-kelompok sosial lain untuk menyesuaikan diri dengannya, akan tetapi berbagai pengaruh pengembangan pola dan gaya hidup baru telah pula menyebabkan keragaman prinsip hidup. Faktor utama adalah pengaruh program pembangunan nasional yang secara terencana diarahkan kepada pengembangan pola kebudayaan industri, di dalam mana kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan memperoleh kesejahteraan yang sama, dalam persatuan dan kesatuan.

Disiplin diri dan disiplin sosial warga masyarakat yang berorientasi kepada kebudayaan industri dicirikan oleh pentingnya perencanaan masa depan dan penjadwalan dengan kemauan sendiri yang bersifat rasional, dan bahwa keberhasilan setiap perencanaan tersebut hanya mungkin berdasarkan usaha individu yang bersangkutan. Pandangan hidup seperti ini mengacu kepada tiga konsep utama, yaitu percaya diri, **kritis**, dan **dinamis**. Pandangan hidup seperti ini bersumber dari kesadaran tentang penting dan berharga kemampuan akal manusia, sehingga dapat juga disebut sebagai filsafat rasional atau moderen. Masyarakat industri maju juga ditandai oleh pemberlakuan hukum dan undang-undang formal secara ketat, yaitu ada sanksi dan petugas pelaksanaan eksekusi hukum.

Berkenaan dengan sikap dan perilaku antri sebagai bagian dari disiplin sosial warga masyarakat yang memegang prinsip **prima**, **rila** dan **sabar** cenderung untuk mengikuti barisan antri dengan sikap apa adanya, tidak terburu-buru, dan tidak memprotes ataupun tersinggung ketika ada orang lain yang mendahului dirinya dari belakang, sehingga dapat dianggap seolah-olah tidak begitu membutuhkan kesempatan. Namun, sesungguhnya sikap dan perilaku yang cenderung dianggap "pasti" dan "menghindari konflik langsung" dari sudut pandangan masyarakat industri maju tersebut tidak banyak lagi dianut secara utuh oleh warga masyarakat Yogyakarta. Berbagai perubahan serta keterlibatan mereka dalam arus kehidupan yang penuh kesibukan dan persaingan menyebabkan hanya orang-orang yang benar-benar mendalami kebathinan yang mampu bersikap demikian.

Akan tetapi sebagai unsur-unsur pokok pandangan hidup kejawen, prinsip "sabar" demikian tetap dijalankan oleh sebagian besar warga masyarakat dengan sedikit pengembangan. Dalam hal ini mereka sudah berani membela hak demi tatanan dengan tidak lagi menghindari konflik yang ditimbulkan orang lain. Berbagai pengalaman hidup yang penuh persaingan dan kesibukan mengejar waktu menyebabkan mereka sadar bahwa mereka tidak boleh lagi menghindari tantangan. hanya saja mereka menghadapi dengan sikap "sabar" dan perilaku "lembut"

Sementara itu berkenan dengan sikap dan antri dalam prinsip kehidupan masyarakat industri seperti di atas selain individualis, rasional jelas bersifat formal. Karena selalu dikaitkan kepada kejelasan hukum dan sanksinya, sehingga setiap tindakan tidak berdisiplin yang dapat merugikan orang lain dapat dituntut secara hukum. Pemberian kekuatan hukum pada perilaku seperti antri ini sudah mulai diberlakukan secara ketat pada lingkungan instansi atau instansi tertentu di kota Yogyakarta. Misalnya menindak dengan ancaman hukum setiap kendaraan yang memaksa mendahului kendaraan lain pada saat lalu lintas berhenti karena lampu merah sedang menyala. Atau menindak orang yang dilaporkan sengaja menyerobot, mendahului dan menghalang-halangi orang lain dalam suatu antrian yang panjang.

Berdasarkan semua fakta seperti diuraikan pada bab-bab terdahulu maka sampailah kita pada kesimpulan, bahwa hipotesa kerja yang dikemukakan pada awal tulisan ini tidak banyak berbeda dengan kenyataan di lapangan. Bahwa kesadaran masyarakat Yogyakarta mengenai pentingnya ketertiban dan kelancaran sistem antri dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang langka atau jumlahnya terbatas ditentukan oleh sistem nilai budaya yang dijadikannya pedoman dalam bertindak. Sistem nilai budaya Jawa, atau tradisi kejawen atau tradisi keraton memang dominan, akan tetapi proses perubahan yang dialami oleh masyarakat Yogyakarta secara umum menunjukkan adanya gejala peralihan disiplin dalam antri dari prinsip **nrima**, **rila**, dan **sabar** yang ketat kepada prinsip disiplin berdasarkan pertimbangan **akal**, **kritis**, dan **dinamis**.

DAFTAR BAHAN BACAAN

Mulder, Niels 1995

Pribadi dan masyarakat di Jawa, Penerbit PT Sinar Harapan Jakarta.

Geertz, Clifford 1960

The Religion of Java, New York: The Free Press of Glencoe.

Magnis-Soeseno, Franz 1984

Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa, PT Gramedia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto 1987

Disiplin Sosial: Tata tertib atau Tata krama?, dalam pisma nomor 3, tahun XVI, Maret, LP3ES, Jakarta.

Warnaen, Suwarsih 1985

"Disiplin sebagai Suatu Kebijakan Dilihat dari Pandangan Psikologi Sosial" (makalah), Seminar Disiplin Di Cisarua, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Jakarta.

Suratman, Ki 1988

Disiplin Nasional dan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Pandangan Ajaran Taman Siswa dan Kebudayaan, Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta.

Murniatmo, Gatut (ed.) 1994/1995

Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta, tim peneliti: Sumintarsih, Suratmin, Isni Herawati, Noor Sulistio Budi. Proyek Pengkajian dan pembinaan Nilai-nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Bintarto, R. 1983

Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ihrom, T.O. 1986

"Ngantri: Perwujudan Rasa Tanggung Jawab dan Disiplin Nasional" (makalah), Pertemuan Ilmiah Proyek Pengembangan Nilai Budaya, Bogor.

Sairin, Syafrin 1992

"Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota: Mengapa Tidak Antri" (makalah), seminar Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, Yogyakarta.

Magnis-Soeseno, Frans dan Reksosusilo 1983

Etika Jawa dalam Tantangan, Yayasan Kanisius, Jakarta

Rusana, Yus dkk., 1988/1989

Pandangan Hidup Orang Jawa, seperti Tercermin Dalam Kehidupan Masyarakat Dewasa Ini, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hoebel, E Adamson & Frost, Everett L., 1976

Cultural and Sosial Antropology, New York: McGraw-hill Book Co.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA SIKAP BUDAYA ANTRI MASYARAKAT YOGYAKARTA

I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. **Pengamatan langsung** ke arena-arena sosial atau tempat-tempat pertemuan umum.
2. **Pengamatan pendapat umum** melalui obrolan "tak langsung" (tanpa menunjukan adanya wawancara) dengan beberapa individu dalam arena-arena sosial ybs.
3. **Pengumpulan pendapat tokoh**, yaitu warga kota Yogyakarta yang dapat dikategorikan sebagai informan pokok. Jadi dapat berasal dari golongan:
 - budayawan, seniman, pemikir sosial
 - intelektual (dosen, mahasiswa, guru)
 - pejabat berwenang, kepala pusat pelayanan umum.
4. **Pengumpulan bahan literatur**, khususnya buku-buku atau naskah yang mengkaji masalah sosial-budaya dan mentalitas masyarakat Yogyakarta khususnya dari suku bangsa Jawa.
5. **Pengumpulan data sekunder**, biasanya berupa monografi daerah setempat yang terdapat di kantor-kantor pemda.
6. **Penggunaan peta demografi**, untuk menjelaskan pola persebaran dan kepadatan golongan-golongan etnis di Yogyakarta.

II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT YOGYAKARTA

1. Berikan bukti dan data-data pendukung tentang adanya kebudayaan umum lokal dan kebudayaan dominan di Yogyakarta. Gunakan pendekatan Brunner dalam meneliti masyarakat urban di Medan, Bandung dan Yogyakarta.
2. Kumpulan bukti-bukti dan data-data tentang tipe masyarakat Yogyakarta yang tergolong sebagai "masyarakat peralihan" dari

dari kebudayaan agraris kepada kebudayaan industri. Gunakan pendekatan perubahan sosial dan konsep - konsep tentang modernisasi.

3. Temukan bahan-bahan mengenai ada atau tidaknya "nilai-nilai kebudayaan lama yang berkenaan dengan perilaku antri dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta.

III. PERILAKU BUDAYA ANTRI MASYARAKAT YOGYAKARTA

1. Bagaimana sikap masyarakat umum Yogyakarta terhadap perilaku antri dalam berbagai arena sosial?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai masalah antri di kota mereka?
 - a. Golongan budayawan, seniman, pemikir budaya
 - b. Golongan Intelektual : dosen, guru, mahasiswa, pelajar
 - c. Golongan Otoritas : pejabat pemda, pemimpin kantor atau lembaga pelayanan umum (kantor pos, kepala stasiun, kepala terminal, lurah, camat, PLN, Rumah Sakit, dll.)
3. Bagaiman perilaku antri masyarakat Yogyakarta di pusat Pelayanan transportasi?(di Stasiun K.A, terminal bus/oplek/bemo)
4. Bagaimana perilaku antri masyarakat Yogyakarta di pusat-pusat pelayanan umum?(di kantor-kantor : Pos, PLN. Bank, Kelurahan, kecamatan, Rumah Sakit, pasar dll).
5. Bagaimana perilaku antri masyarakat Yogyakarta pusat-pusat hiburan dan rekreasi?(di Bioskop, Museum,Keraton, Taman Sriwedari, Kebun Binatang dan lain-lain).

